

Vol. 02

No. 02

Web jika.karawangkab.go.id

JIKa

Jurnal Ilmiah Karawang

Desember | 2024



BAPPEDA KABUPATEN KARAWANG
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Gd. Rubaya Lt. 2 Kompleks Kantor Bupati Karawang





Volume 02 Nomor 02: Desember 2024
Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Penanggung Jawab

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Editor in Chief

Ns. Samsuri, S.Kep., M.M. (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Associate Editor

Anditania Sari Dwi Putri, A.Md (BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Vitalani Rahmatiani, S.P.W (BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Mazaya Falah Partikana, S.T. (BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Melly Nurmeida, S.Ak (BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Editorial Board

Jajang Jaenudin, S.STP, M.M (Ilmu Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia)

Dr. H. Deden Thosin Waskita, M.Pd (Pendidikan, Manajemen)

Dr. Rahman Tanjung, S.E., M.M. (Ekonomi Pembangunan, Manajemen Pendidikan)

Hj. Lina Jazuli, S.KM, M.M. (Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan)

Rika Fauziah, S.Pi., M.S.E, M.A (Perikanan, Perencanaan Wilayah)

Dadan Nurdiansyah, S.IP, M.Kesos (Ilmu Pemerintahan dan Humaniora)

Dr. Aries Purwanto, S.T., M.Si, M.Sc (Manajemen Air dan Lahan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam)

Fazriyan Wardani Adhitya, S.T., M.S.E (Perikanan dan Kelautan)

Arif Setiawan, M.Kom (Teknik Informatika)

dr. Nurmala Hasanah, M.M. (Kesehatan, Manajemen Kesehatan)

Agustien Nurisamunandar, S.P., M.Si (Pertanian, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan)

Azis Kemal Fauzie, S.T., M.Sc, Ph.D (Kimia, Lingkungan Hidup)

Rd. Ade Komarudin, S. Pi., M.Si. (Perikanan dan Kelautan, Manajemen Kawasan Pesisir)

Dra. Eka Setiawati, M.AP (Adminstrasi Negara)

Fahmi Ardiansyah, S.T., M.T. (Teknik Sipil)

Nuraini Maharani, S.T., M.T. (Teknik Sipil)

Navis Bustiawan, S.T., M.PSDA (Sumber Daya Air)

Faisal Riza, S.T., M.T., M.Sc. (Lingkungan Hidup, Perencanaan Tata Kota)

Dhidhik Triyuhana, S.T., M.T., M.Eng (Teknik Kimia, Perencanaan Tata Kota)

Tasya Sukma Maftuhah, S.T., M.T. (Teknologi Informasi)

Penerbit

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang

Alamat Redaksi

Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Karawang
Gd. Rubaya Lt. 2 Kompleks Kantor Bupati Karawang, Jl. A. Yani No. 1, Kec. Karawang Barat, Kab.
Karawang, Jawa Barat 41314
E-mail: litbang.bappedakrw@gmail.com



Volume 02 Nomor 02: Desember 2024
Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
Artikel	i
Analisis Keterkaitan Ekonomi Antara Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan dalam Perekonomian Kabupaten Karawang Menggunakan Metode Analisis Input-Output (Muhammad Ihsan Akbar)	1-14
Peran Iklim Usaha untuk Mendorong Inovasi Digital dan Peningkatan Kinerja Pengusaha Nahdliyin (Rohmat Sarman, Azhar Affandi, Horas Djulius)	15-28
Strategi Peningkatan Inovasi Daerah di Kabupaten Karawang (Rika Fauziah, Intan Kelana)	29-40
Menghadapi Tantangan Global Strategi “Kedaulatan Ekonomi” untuk Pengentasan Kemiskinan di Karawang (Septiyana Razak Priyatna)	41-56
Meninjau Kembali Interlinkages Pendidikan Dan Kemiskinan Dalam Pencapaian SDGS Di Kabupaten Karawang (Eti Sumiyati)	57-62

Analisis Keterkaitan Ekonomi Antara Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan dalam Perekonomian Kabupaten Karawang Menggunakan Metode Analisis Input-Output

Analysis of Linkage Economy Between the Agricultural Sector and the Manufacturing Industry in the Economy of Karawang Regency Using the Input-Output Analysis Method

Muhammad Ihsan Akbar¹

Institut Teknologi Sains Bandung, Perumnas Bumi Telukjambe Blok R

e-mail: 1ihsanakbar0810@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyangga kebutuhan pangan Prov. Jawa Barat dan nasional (sektor pertanian) serta sebagai kawasan industri (sektor industri). Meskipun mengemban tugas di dua sektor sekaligus, namun perkembangan nilai tambah keduanya belum dapat tumbuh seimbang dalam struktur perekonomian daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Karawang, sebagaimana visi pembangunan jangka panjang daerah yang berpacu pada keseimbangan di dua sektor tersebut. Metode analisis yang digunakan berupa Input-Output (I-O), meliputi efek pengganda matriks invers Leontief dan dampak penyebaran yang dilaksanakan dengan menurunkan tabel (I-O) Prov. Jawa Barat ke (I-O) Kabupaten Karawang. Secara eksplisit, berdasarkan hasil analisis matriks invers Leontief diketahui bahwa keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan industri pengolahan di Kabupaten Karawang sudah saling terkait, baik keterkaitan ke belakang dan depan. Namun secara implisit, kinerja keterkaitan kedua sektor tersebut belum dapat berjalan seimbang dalam perekonomian Kabupaten Karawang, dimana berdasarkan hasil analisis dampak penyebaran diketahui bahwa sektor industri masih menjadi sektor *leader* dalam pertumbuhan ekonomi daerah (kuadran I) karena baik keterkaitan ke belakang dan depan sektor tersebut sangat baik, sedangkan sektor pertanian perlu didorong dan didukung oleh sektor lain karena kemampuan sektor tersebut lemah (kuadran III).

Kata kunci: *Input-Output*, Keterkaitan Ekonomi, Karawang

ABSTRACT

Karawang Regency is a region that has a dual function, namely as a buffer for food needs for West Java Province and the nation (agricultural sector) and as an industrial area (industrial sector). Although tasks are carried out in two sectors at once, the development of the added value of both

has not been able to grow in balance with the regional economic structure. The study aims to determine the condition of the economic linkages between the agricultural sector and industry in the economy of Karawang Regency, as the long vision of regional development is based on balance in the two sectors. The analysis method used is Input-Output (I-O), including the Leontief inverse matrix multiplier effect and the impact of the spread which is carried out by reducing the (I-O) table of West Java Province to (I-O) Karawang Regency. Explicitly, based on the results of the Leontief inverse matrix analysis, it is known that the economic linkages between the agricultural sector and industry in Karawang Regency are interrelated, both backward and forward linkages. However, implicitly, the performance of the linkages of the two sectors has not been able to run in balance in the economy of Karawang Regency, where based on the results of the analysis of the impact of distribution, it is known that the industrial sector is still the leading sector in regional economic growth (quadrant I) because both the backward and forward linkages of the sector are very good, while the agricultural sector needs to be encouraged and supported by other sectors because the capabilities of the sector are weak (quadrant III).

Keywords: *Input-Output, Economic Linkages, Karawang*

1. Pendahuluan

Pembangunan wilayah merupakan suatu upaya untuk mencapai pembangunan yang berimbang. Makna dari pembangunan yang berimbang merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya potensi-potensi pembangunan suatu wilayah sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembangunan yang berimbang diantaranya ditujukan untuk : a) mengembangkan perekonomian secara simultan dan bertahap; b) pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat; c) untuk mengembangkan kapasitas dan mengkonservasi sumberdaya (S Murty, 2000 dikutip dalam Kuswandi, 2012).

Pengembangan merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan (Putra, 2021). Hal ini didasarkan pada pemaknaan dari pengembangan wilayah sebagai suatu program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan wilayahnya. Konsep dalam pengembangan wilayah sendiri adalah untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan suatu daerah (Anwar, 1999).

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat dan nasional serta sebagai kawasan industri. Dualisme fungsi tersebut telah dijelaskan dalam (*RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042*, 2022), yaitu menjadikan Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang berfokus pada simpul pendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri non-politif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, serta kegiatan agroindustri. Selain itu, peran sektor industri Kabupaten Karawang juga dipandang penting dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Jawa untuk Provinsi Jawa Barat, berupa penunjukannya sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI

(*Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*, 2015). Sejalan dengan itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Karawang (*RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025*, 2010) juga berpacu pada “Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri” untuk tercapainya keterkaitan yang kuat antara potensi ril sektor pertanian yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan dengan struktur industrinya.

Meskipun mengembang tugas didua sektor sekaligus, namun perkembangan nilai tambah antara sektor pertanian dan industri pengolahan belum mampu tumbuh seimbang dalam struktur perekonomian daerah. Dimana diketahui selama tahun 2018-2022 dalam PDRB ADHB Kabupaten Karawang, sektor pertanian hanya menjadi penyumbang terendah dengan rata-rata kontribusinya sebesar 4.0 %, sementara sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi sebesar 70.9% dari total empat sektor lapangan usaha teratas dalam struktur perekonomian daerah. Hal tersebut berbeda dengan kondisi perekonomian Kabupaten Karawang pada tahun 1985, dimana kontribusi terbesar masih disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 37,04% dan disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 13,09% (*RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025*, 2010). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya tertuju/terkait dengan pemanfaatan sektor pertaniannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian serupa, salah satunya milik (Yanti Sofia, 2010) tentang sektor unggulan di Kabupaten Sumedang melalui analisis input output, dengan hasil yang didapat berupa sektor industri seagai sektor unggulan daerah, sedangkan sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya (angkutan, listrik, bangunan, keuangan, dan jasa) perlu mendapat dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah karena kemampuan sektor tersebut lemah.

Berdasarkan pada acuan penelitian di atas, maka kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk menjabarkan kondisi keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan industri pengolahan di Kabupaten Karawang menggunakan analisis input output matriks invers Leontief terbuka, serta penjelasan secara menyeluruhnya melalui analisis input output dampak penyebaran. Menimbang pada isu permasalahan di atas, maka disusunnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan ekonomi yang terjalin antara sektor pertanian dan industri pengolahan di Kabupaten Karawang sebagaimana visi pembangunan jangka panjang daerah yang berpacu pada keseimbangan didua sektor tersebut.

2. Metodologi

Analisis input output dikembangkan untuk menganalisis dan mengukur hubungan-hubungan antara berbagai sektor produksi dan konsumsi dalam perekonomian regional (Rachman, 1993). Pada penelitian ini, digunakan tabel matriks (I-O) berdasarkan transaksi domestik atas dasar harga produsen di Kabupaten Karawang untuk diketahui secara detail terkait hubungan aliran transaksi yang terjadi antar sesama pelaku ekonomi. Namun, dikarenakan tabel (I-O) untuk kab/kota sangat jarang ditemui, serta hanya diperbarui disetiap lima tahun sekali, sehingga diperlukan penaksiran tabel matriks teknologi (I-O) kab/kota berdasarkan pada tabel (I-O) wilayah referensinya. Hal ini menimbang pada belum tersedianya tabel (I-O) Kabupaten Karawang serta (I-O) Prov. Jawa Barat yang hanya tersedia untuk tahun 2016. Secara garis besar, digunakan tahap penaksiran menggunakan metode non survey LQ dan RAS, sebagaimana ringkasan tahapan berikut,

- 1) Memperbaharui tabel (I-O) Prov. Jawa Barat tahun 2016 ke 2021 menggunakan metode RAS pada Ms. Excel. Metode Ras sendiri diperkenalkan oleh R. Stone dari Universitas Cambridge pada tahun 1961 sebagai pendekatan dalam menaksir perubahan koefisien

input-output pada dua periode yang berbeda (Hulu, 1991). Perhitungan dikatakan selesai bilamana hasil iterasi telah menunjukkan tabel matriks yang seimbang antara total input dan output.

- 2) Menaksir tabel (I-O) Kabupaten Karawang dari tabel (I-O) Prov. Jawa Barat tahun 2021 yang diawali dengan :
 - mengestimasi koefisien teknis Kabupaten Karawang menggunakan LQ (Location Quotient), Jika nilai $LQ \geq 1$, maka nilai koefisien Prov. Jawa Barat dapat langsung diserap sebagai nilai koefisien wilayah Kabupaten Karawang. Sedangkan jika nilai $LQ < 1$, maka nilai koefisien sektor harus dikalikan dengan nilai LQ Kabupaten untuk menyerapnya sebagai nilai koefisien wilayah Kabupaten Karawang (penurunan perilaku dilakukan per kolom) (Ugoy dalam Martono, 2008 dikutip dalam Prasetyo, 2021)
 - melakukan iterasi menggunakan metode RAS untuk mendapatkan tabel (I-O) Kabupaten Karawang tahun 2021. Perhitungan iterasi dikatakan selesai bilamana tabel menunjukkan nilai total input dan output yang sama.
- 3) Didapatkan tabel (I-O) Kabupaten Karawang transaksi domestik atas dasar harga produsen 17 sektor lapangan usaha tahun 2021. Adapun, pembacaan tabel dilakukan secara baris dan kolom. Pembacaan baris memaknakan output sektor i yang digunakan oleh sektor j untuk kebutuhan input produksinya. Adapun, pembacaan kolom memaknakan input yang dibutuhkan sektor i dari sektor j untuk menghasilkan produk.

Setelah didapatkan tabel (I-O) Kabupaten Karawang tahun 2021, maka selanjutnya dilakukan analisis efek pengganda/matriks invers Leontief meliputi hal berikut,

- a) keterkaitan langsung ke belakang, keterkaitan ini menunjukkan akibat kenaikan per unit permintaan total oleh suatu sektor terhadap sektor lain yang menyediakan input (Rachman, 1993).
- b) Keterkaitan tidak langsung ke belakang, menunjukan pengaruh tak langsung dari adanya kenaikan permintaan akhir sebesar satu unit suatu oleh sektor terhadap tingkat produksi sektor lainnya yang menggunakan output sektor tersebut sebagai input antaranya (Rachman, 1993)
- c) Keterkaitan langsung ke depan, merupakan pengaruh suatu sektor tertentu terhadap sektor lain yang menggunakan sebagian dari output sektor tersebut per unit kenaikan permintaan totalnya (Rachman, 1993)
- d) Keterkaitan tidak langsung ke depan, merupakan pengaruh tidak langsung dari adanya kenaikan satu unit permintaan akhir semua sektor terhadap tingkat produksi sektor tertentu (Rachman, 1993).

Selanjutnya, dilakukan analisis dampak penyebaran untuk menggambarkan kondisi keterkaitan ekonomi seluruh sektor sesuai dengan hasil pembagian dalam kuadrannya. Dalam hal ini meliputi dua hal,

- a) Koefisien Penyebaran (α), digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu sektor dalam mempengaruhi/meningkatkan pertumbuhan sektor hulunya. Oleh karena itu, koefisien penyebaran dapat dinotasikan sebagai berikut (Nazara, 2008) :

$$Cd_j = \frac{n \sum_{i=1}^n a_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}$$

Keterangan :

Cd_j : Koefisien penyebaran sektor j

a_{ij} : Matriks kebalikan koefisien *input* model terbuka

n : Jumlah sektor

Jika

$Cd_j > 1$: sektor j mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi

$Cd_j < 1$: sektor j mempunyai keterkaitan ke belakang yang rendah

- b) Kepekaan Penyebaran (β), digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor lain yang menggunakan input dari sektor tersebut. Oleh karena itu, koefisien penyebaran dapat dinotasikan sebagai berikut (Nazara, 2008).

$$Sd_j = \frac{n \sum_{i=1}^n a_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}$$

Keterangan :

Sd_j : Kepekaan penyebaran sektor j

a_{ij} : Matriks kebalikan koefisien *input* model terbuka

n : Jumlah sektor

Jika

$Sd_j > 1$: sektor j mempunyai kepekaan penyebaran yang tinggi

$Sd_j < 1$: sektor j mempunyai kepekaan penyebaran yang rendah

Hubungan antara Indeks Daya Penyebaran (α) dan Indeks Derajat Kepekaan (β) dapat digambarkan pada pembagian kuadran berikut (Yanti Sofia, 2010):

Kuadran I $[\beta > 1 \text{ dan } \alpha > 1]$ Sektor "leader" dalam pertumbuhan ekonomi	Kuadran II $[\beta > 1 \text{ dan } \alpha < 1]$ Ketergantungan sektor ini terhadap sektor lain tinggi, sedangkan daya dorong terhadap sektor lain kecil
Kuadran III $[\beta \text{ dan } \alpha < 1]$ Sektor ini memerlukan dorongan dan dukungan dari sektor lain karena kemampuan diri sektor ini lemah	Kuadran IV $[\beta < 1 \text{ dan } \alpha > 1]$ Sektor dapat mendorong sektor lain, tetapi ketergantungan ke sektor lain rendah / sektor termasuk mandiri
Kuadran V $[\beta \text{ dan } \alpha = 1]$ Indeks Daya Penyebaran Indeks Derajat Kepekaan sektor j sama dengan rata-rata Indeks Daya Penyebaran dan/atau Indeks Derajat Kepekaan seluruh sektor ekonomi	

Gambar 1. Kuadran Analisis Dampak Penyebaran (I-O)

Sumber: Yanti Shofia, 2010

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Tabel 1. Tabel (I-O) Kabupaten Karawang Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen

Tabel Input Output (I-O) Kabupaten Karawang Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2021 (Juta Rupiah)																					
Deskripsi		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Lainnya	Total Permintaan Antara	Total Konsumsi Akhir	Total Output
Kode		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MN	O	P	Q	RSTU	1800	3090	3100
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,091.9	1.6	1,926,590.9	30.4	0.3	1,058.7	750.5	17.5	44,176.7	0.0	6.0	-	-	908.0	767.4	1,551.1	1,634.6	2,017,586	3,365,559	5,383,145
B	Pertambangan dan Penggalian	32.8	142,993.1	629,357.1	596,293.2	1.1	60,556.4	180.0	13.2	9.2	47.1	20.1	0.4	0.3	89.7	4.4	5.6	9.9	1,429,614	2,384,696	3,814,310
C	Industri Pengolahan	158,056.9	162,727.6	73,969,389.8	318,832.6	18,905.5	1,396,450.8	1,415,115.1	389,624.0	139,206.4	73,632.8	18,948.0	1,452.1	573.4	30,294.8	39,840.2	38,524.9	88,068.0	78,259,643	130,545,818	208,805,461
D	Pengadaan Listrik dan Gas	211.3	2,242.5	402,914.5	865,802.0	587.1	226.1	9,175.9	956.0	1,964.0	4,667.3	377.3	18.5	5.8	1,146.4	596.7	113.5	1,337.2	1,292,342	2,155,689	3,448,031
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	4,490.7	94.7	33,184.5	1,754.4	12,529.6	3,630.3	13,046.3	226.7	5,954.4	489.5	76.6	46.9	5.5	576.0	134.7	205.9	2,566.8	79,014	131,803	210,817
F	Konstruksi	72,406.2	368,224.4	2,473,132.4	21,865.4	18,501.1	95,477.1	126,736.3	27,340.5	6,464.5	16,559.3	17,304.5	5,409.0	108.5	44,912.7	5,541.7	6,553.0	17,301.7	3,323,838	5,544,519	8,868,358
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	31,705.6	39,296.3	6,407,731.3	95,605.8	2,114.4	171,251.8	139,402.0	36,501.0	42,059.6	8,849.2	3,037.9	176.2	98.6	5,591.4	4,853.0	5,168.4	10,269.4	7,003,712	11,682,965	18,686,677
H	Transportasi dan Pergudangan	3,263.0	25,269.6	1,133,579.9	17,282.0	356.9	50,778.6	93,176.4	48,074.5	7,323.2	4,608.8	494.5	41.0	18.4	3,670.3	712.0	541.3	857.4	1,390,048	2,318,752	3,708,800
I	Penyediaan Akomodasi dan	2,069.2	21,813.3	601,274.5	17,388.9	705.9	15,179.1	23,113.8	6,732.4	34,903.6	6,025.3	2,828.4	155.2	35.7	25,526.9	6,458.5	4,150.8	14,199.1	782,561	1,305,394	2,087,955
J	Informasi dan Komunikasi	1,255.7	6,181.0	923,603.5	49,444.3	415.8	36,841.6	139,345.1	12,739.9	11,677.5	164,191.4	12,732.4	347.6	86.9	4,738.6	3,802.6	1,724.5	8,256.9	1,377,385	2,297,624	3,675,009
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,180.9	16,032.5	489,140.3	109,408.3	811.4	26,253.8	100,485.0	5,359.8	3,865.5	11,056.8	12,016.8	863.3	26.9	710.3	1,180.5	1,015.4	2,242.2	784,650	1,308,871	2,093,521
L	Real Estate	-	440.9	131,693.3	-	30.9	5,141.5	55,588.6	1,301.7	2,813.0	2,116.3	1,280.0	125.5	4.2	1,193.6	705.1	1,036.0	2,021.4	205,492	342,783	548,275
MN	Jasa Perusahaan	57.8	256.4	15,392.1	2,592.6	9.0	233.7	1,537.6	113.8	78.5	402.2	171.6	3.6	2.7	182.6	37.6	48.0	84.2	21,204	35,370	56,574
O	Administrasi Pemerintahan,	1,708.4	-	-	290,417.7	483.1	-	-	71,029.0	8,115.0	10,141.9	70,701.9	4,810.9	487.6	58,073.0	17,227.8	14,011.4	966.7	548,174	914,377	1,462,551
P	Jasa Pendidikan	234.4	652.4	131,979.1	15,088.8	25.3	1,607.0	452,924.6	1,969.3	2,878.8	1,410.5	14,481.3	7.7	51.9	11,701.2	57,678.4	2,026.3	6,033.5	700,750	1,168,923	1,869,673
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,977.7	996.9	166,694.9	881.9	244.1	3,952.1	48,485.9	509.3	609.6	219.1	511.5	6.1	4.0	66.8	2,043.1	5,147.8	1,422.7	233,774	389,960	623,733
RSTU	Jasa Lainnya	9,529.3	3,783.3	426,724.9	13,814.4	6,319.2	4,244.3	109,018.7	5,089.2	16,612.4	10,743.4	1,219.0	336.3	13.2	1,481.0	1,375.1	1,023.5	17,161.8	628,489	1,048,387	1,676,876
Total Input Antara 1900		331,272	791,007	89,862,383	2,416,503	62,041	1,872,883	2,728,082	607,598	328,712	315,161	156,208	13,800	1,523	190,863	142,959	82,847	174,433			
NTB 2090		5,051,873	3,023,303	118,943,078	1,031,528	148,776	6,995,475	15,958,595	3,101,202	1,759,243	3,359,848	1,937,313	534,475	55,051	1,271,688	1,726,714	540,886	1,502,443			
Total Input 2100		5,383,145	3,814,310	208,805,461	3,448,031	210,817	8,868,358	18,686,677	3,708,800	2,087,955	3,675,009	2,093,521	548,275	56,574	1,462,551	1,869,673	623,733	1,676,876			

File Edit Tools Model About

File: CEK BALANCING IO KARAWANG TAHUN 2021

Row: 1 Col: 1

File: CEK BALANCING IO KARAWANG TAHUN 2021

30°C 243 PM 12/2/2024

Information

Table is Balanced.

OK

Gambar 2. Cek Balancing Tabel (I-O) Kabupaten Karawang menggunakan software IOW

Sumber: Penulis, 2024

3.1.1. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Tahun 2021

Tabel 2. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung

MATRIKS KEBALIKAN LEONTIEF TRBUKA																	
DEKSRIPI		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan	Konstruksi	Perdagangan Besar dan	Transportasi dan Perhubungan	Penyediaan Akomodasi dan Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Jasa Lainnya
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1.008	0.001	0.015	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.004
Pertambangan dan Penggalian	B	0.000	1.040	0.006	0.241	0.002	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001
Industri Pengolahan	C	0.051	0.098	1.564	0.232	0.179	0.254	0.124	0.171	0.113	0.000	0.019	0.007	0.017	0.046	0.037	0.104
		Forward Linkage (Langsung + Tidak)															

Pengad aan Listrik dan Gas	D	0.0 00	0.0 01	0.0 04	1.3 36	0.0 04	0.0 01	0.0 01	0.0 01	0.0 02	0.0 02	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 01	0.0 01	0.0 01	1.3 57
Pengad aan Air, Pengelo laan Sampah , Limbah dan Daur Ulang	E	0.0 01	0.0 00	0.0 00	0.0 01	1.0 63	0.0 01	0.0 01	0.0 00	0.0 03	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 00	0.0 00	0.0 02	1.0 74
Konstru ksi	F	0.0 15	0.1 03	0.0 20	0.0 40	0.0 97	1.0 15	0.0 09	0.0 11	0.0 06	0.0 05	0.0 10	0.0 10	0.0 02	0.0 33	0.0 04	0.0 13	0.0 12	1.4 06
Perdaga ngan Besan dan Eceran; Reparas i Mobil dan Sepeda Motor	G	0.0 08	0.0 16	0.0 49	0.0 49	0.0 19	0.0 28	1.0 12	0.0 16	0.0 25	0.0 04	0.0 02	0.0 01	0.0 02	0.0 07	0.0 04	0.0 12	0.0 10	1.2 63
Transpo rtasi dan Perguda ngan	H	0.0 01	0.0 08	0.0 09	0.0 11	0.0 04	0.0 08	0.0 06	1.0 14	0.0 04	0.0 02	0.0 01	0.0 00	0.0 00	0.0 03	0.0 01	0.0 02	0.0 01	1.0 74
Penyedi aan Akomod asi dan Makan Minum	I	0.0 01	0.0 07	0.0 05	0.0 11	0.0 05	0.0 03	0.0 02	0.0 03	1.0 18	0.0 02	0.0 02	0.0 01	0.0 01	0.0 19	0.0 04	0.0 08	0.0 09	1.0 98
Informa si dan Komuni kasi	J	0.0 01	0.0 03	0.0 08	0.0 23	0.0 04	0.0 06	0.0 09	0.0 05	0.0 07	1.0 47	0.0 07	0.0 01	0.0 02	0.0 04	0.0 02	0.0 04	0.0 06	1.1 37
Jasa Keuang an dan Asurans i	K	0.0 01	0.0 05	0.0 04	0.0 45	0.0 05	0.0 04	0.0 06	0.0 02	0.0 02	0.0 03	1.0 06	0.0 02	0.0 01	0.0 01	0.0 01	0.0 02	0.0 02	1.0 92
Real Estate	L	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 01	0.0 00	0.0 01	0.0 03	0.0 01	0.0 02	0.0 01	0.0 01	1.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 00	0.0 02	0.0 01	1.0 15
Jasa Perusah aan	MN	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	1.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	1.0 02
Adminis trasi Pemerin tahan, Pertaha nan dan Jaminan Sosial Wajib	O	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.1 19	0.0 03	0.0 00	0.0 01	0.0 20	0.0 05	0.0 03	0.0 36	0.0 09	0.0 09	1.0 42	0.0 10	0.0 24	0.0 01	1.2 84
Jasa Pendidi kan	P	0.0 00	0.0 01	0.0 02	0.0 09	0.0 01	0.0 01	0.0 25	0.0 01	0.0 02	0.0 01	0.0 08	0.0 00	0.0 01	0.0 09	1.0 32	0.0 04	0.0 04	1.1 02
Jasa Kesehat an dan Kegiata n Sosial	Q	0.0 00	0.0 00	0.0 01	0.0 01	0.0 02	0.0 01	0.0 03	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 01	1.0 08	0.0 01	1.0 20
Jasa Lainnya	RS TU	0.0 02	0.0 01	0.0 04	0.0 07	0.0 33	0.0 01	0.0 06	0.0 02	0.0 09	0.0 03	0.0 01	0.0 01	0.0 00	0.0 01	0.0 01	0.0 02	1.0 11	1.0 85

Backward Linkage (Langsung +Tidak Langsung)	1.0 89	1.2 86	1.6 94	2.1 28	1.4 23	1.3 33	1.2 10	1.2 49	1.2 21	1.1 10	1.0 92	1.0 32	1.0 37	1.1 70	1.0 99	1.1 90	1.1 52	21. 515
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Sumber: Penulis, 2024

3.1.2. Analisis Dampak Penyebaran Tabel Untuk 17 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karawang

Tabel 3. Analisis Dampak Penyebaran Beserta Pembagian Kuadrannya

Sektor Lapangan Usaha	Kode Sektor	Koefisien Penyebaran (α)	Kepekaan Penyebaran (β)	Kuadran Dampak Penyebaran
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	0.86078487	0.841665493	III
Pertambangan dan Penggalian	B	1.01642031	1.029290563	I
Industri Pengolahan	C	1.33820741	2.480496546	I
Pengadaan Listrik dan Gas	D	1.68158133	1.071950414	I
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1.12436696	0.848231057	IV
Konstruksi	F	1.05320852	1.110769104	I
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	0.95599588	0.997893698	III
Transportasi dan Pergudangan	H	0.98705625	0.84878469	III
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	0.9643987	0.867619771	III
Informasi dan Komunikasi	J	0.8770538	0.898459437	III
Jasa Keuangan dan Asuransi	K	0.86306454	0.862485393	III
Real Estate	L	0.81567455	0.801838595	III
Jasa Perusahaan	MN	0.81949587	0.791869609	III
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	0.92415621	1.014639842	II
Jasa Pendidikan	P	0.86859503	0.870467143	III
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	0.93995805	0.806111508	III
Jasa Lainnya	RSTU	0.90998174	0.857427138	III

Kuadran I “sektor <i>leader</i> dalam pertumbuhan ekonomi”	Kuadran II “ketergantungan sektor ini terhadap sektor lain tinggi, sedangkan daya dorong terhadap sektor lain kecil”
- Industri pengolahan - Pengadaan listrik dan gas - Konstruksi - Pertambangan & penggalian	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial
Kuadran III “sektor ini memerlukan dorongan dan dukungan dari sektor lain karena kemampuan diri sektor ini lemah”	Kuadran IV “sektor dapat mendorong sektor lain, tetapi ketergantungan ke sektor lain rendah/sektor termasuk mandiri”
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan - Perdagangan besar & eceran - Transportasi & pergudangan - Penyediaan akomodasi & makan minum - Informasi & komunikasi - Jasa keuangan & asuransi - Real estate - Jasa perusahaan	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang

- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan
- Jasa lainnya

Sumber: Penulis, 2024

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Tahun 2021

Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang merupakan suatu kondisi dimana pengaruh permintaan akhir oleh suatu sektor akan mempengaruhi kinerja produksi sektor penyedia input. Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada tabel 2, diketahui bahwa terdapat lima sektor teratas yang paling besar pengaruhnya terhadap sektor hulu di Kabupaten Karawang, termasuk salah satunya dari sektor industri pengolahan. Kelima sektor tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapan tabel singkat berikut.

Tabel 4. Rekapan 5 (Lima) Sektor Teratas Dalam Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung

Matriks Invers Leontief Terbuka (Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung Sektor Industri Pengolahan (dalam Juta Rupiah))			
Keterangan Sektor Lapangan Usaha	Kode Sektor	Nilai (Juta Rp)	Peringkat
Pengadaan Listrik dan Gas	D	2.128219	1
Industri Pengolahan	C	1.693643	2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1.423006	3
Konstruksi	F	1.332947	4
Pertambangan dan Penggalian	B	1.286388	5
.....			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1.089414	15
Total Keterkaitan Ke Belakang (L+TL)		21.5153	
Rata-rata Keterkaitan Ke Belakang (L+TL)		1.265606	

Sumber: Penulis, 2024

Kelima sektor tersebut memiliki nilai keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung di atas rata-rata seluruh sektor yang artinya sektor tersebut lebih banyak menarik perkembangan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Karawang. Dalam artian, sektor tersebut cenderung lebih banyak menggunakan/memanfaatkan produksi sektor ekonomi lain untuk kebutuhan bahan bakunya dan secara tidak langsung telah terlibat dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sektor hulunya. Hal ini dapat dicontohkan pada nilai keterkaitan ke belakang dari kelima sektor tersebut, seperti salah satunya pada nilai keterkaitan ke belakang sektor industri pengolahan yang menunjukkan nilai 1.693643302 (Juta Rp), Artinya setiap terjadinya kenaikan permintaan output oleh sektor industrinya sebesar 1 (Juta Rp), maka sektor tersebut akan menarik/mempengaruhi perkembangan nilai tambah total sektor penyedia inputnya (hulu) sebesar 1.693643302 (Juta Rp) di Kabupaten Karawang.

3.2.2. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung Oleh Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan hasil analisis matriks invers Leontief keterkaitan ke belakang sektor industri pengolahan sebagaimana tertera pada tabel 2, diketahui bahwa terdapat lima sektor hulu teratas yang paling banyak dilibatkan/ digunakan outputnya untuk kebutuhan input produksi sektor industrinya yaitu: 1) sektor industri pengolahan; 2) sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor); 3) sektor konstruksi; 4) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 5) sektor transportasi dan pergudangan. Kelima sektor tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapan tabel singkat berikut.

Tabel 5. Rekapan 5 (Lima) Sektor Teratas Dalam Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung Pada Sektor Industri Pengolahan

Matriks Invers Leontief Terbuka (Keterkaitan Ke Belakang Secara Langsung dan Tidak Langsung Pada Sektor Industri Pengolahan (dalam Juta Rupiah))			
Keterangan Sektor Lapangan Usaha	Kode Sektor	Industri Pengolahan	Peringkat
		C	
Industri Pengolahan	C	1.563781257	1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	0.049263774	2
Konstruksi	F	0.020132734	3
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	0.014653115	4
Transportasi dan Pergudangan	H	0.009070399	5
.....			
Keterkaitan Ke Belakang (L+TL)		1.693643302	

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan permintaan akhir oleh sektor industrinya sebesar 1 (Juta Rp), maka secara langsung dan tidak langsung sektor tersebut telah menarik perkembangan sektor hulunya sebesar 1.693643302 (Juta Rp). Dengan demikian, maka pembangunan yang diarahkan pada kelima sektor tersebut akan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan sektor industrinya. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan ke belakang sektor industri pengolahan, salah satunya telah melibatkan sektor pertanian sebagai input produksi mereka yaitu sektor berada pada posisi 4 dari total 5 sektor hulu teratas, meskipun secara garis besarnya keterkaitan ke belakang sektor industri pengolahan masih tertuju pada sesama sektor manufaktur.

3.2.3. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Tahun 2021

Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan merupakan suatu kondisi dimana kinerja produksi oleh suatu sektor akan berpengaruh terhadap kemampuan produksi sektor hilirnya, sesuai dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh sektor tersebut. Hal ini dapat dicirikan pada

penyediaan output suatu sektor yang digunakan kembali oleh sektor lain untuk kebutuhan input produksinya. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terdapat lima sektor teratas yang paling besar pengaruhnya terhadap sektor hilir di Kabupaten Karawang sebagaimana tertera lengkap pada tabel 2, termasuk salah satunya dari sektor industri pengolahan. Kelima sektor tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapitan tabel singkat berikut.

Tabel 6. Rekapitan 5 (Lima) Sektor Teratas Dalam Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung

Matriks Invers Leontief Terbuka (Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung (dalam Juta Rupiah))			
Keterangan Sektor Lapangan Usaha	Kode Sektor	Nilai (Juta Rp)	Peringkat
Industri Pengolahan	C	3.139331269	1
Konstruksi	F	1.405796023	2
Pengadaan Listrik dan Gas	D	1.356666857	3
Pertambangan dan Penggalian	B	1.302676295	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	1.284134254	5
.....			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1.065216883	14
Total Keterkaitan Ke Depan (L+TL)		21.51530171	
Rata-rata Keterkaitan Ke Depan (L+TL)		1.265605983	

Sumber: Penulis, 2024

Kelima sektor tersebut memiliki nilai keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung di atas rata-rata seluruh sektor, artinya output dari kelima sektor tersebut telah banyak digunakan kembali / berpengaruh besar terhadap pengguna input sektor hilirnya. Sebaliknya, nilai keterkaitan ke depan sektor pertanian masih berada di bawah nilai rata-rata total atau berada pada peringkat 14 dari total 17 sektor. Rendahnya keterkaitan ke depan sektor pertanian mencerminkan bahwa produksi pada sektor tersebut cenderung masih berorientasi pada pemenuhan konsumsi rumah tangga, bukan pada pemenuhan permintaan pasar untuk pasokan bahan baku sektor lainnya. Pada saat yang sama, kondisi tersebut juga mengartikan bahwa basis perekonomian Kabupaten Karawang tidak tertumpu pada sektor pertaniannya, melainkan tertuju pada sektor industri pengolahan.

3.2.4. Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung Oleh Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil analisis matriks invers Leontief keterkaitan ke depan untuk sektor pertanian sebagaimana tertera pada tabel 2, diketahui bahwa sektor tersebut hanya menempati urutan ke 14 dari total 17 sektor lapangan usaha di Kabupaten Karawang. Meskipun sektor pertanian memiliki nilai keterkaitan ke depan yang rendah, namun setidaknya terdapat 5 (lima) sektor hilir teratas yang paling banyak mengonsumsi hasil pertanian untuk kebutuhan input mereka diantaranya : 1) pertanian; 2) penyediaan akomodasi dan makan minum; 3) industri pengolahan; 4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 5) konstruksi. Kelima sektor tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada rekapitan tabel singkat berikut.

Tabel 7. Rekap 5 (Lima) Sektor Teratas Dalam Analisis Matriks Invers Leontief Terbuka Untuk Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung Pada Sektor Pertanian

Matriks Invers Leontief Terbuka (Keterkaitan Ke Depan Secara Langsung dan Tidak Langsung Pada Sektor Pertanian (dalam Juta Rupiah))			
Keterangan Sektor Lapangan Usaha	Kode Sektor	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Peringkat
		A	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1.007996165	1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	0.022757912	2
Industri Pengolahan	C	0.014653115	3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	0.003674306	4
Konstruksi	F	0.002541202	5
.....			
Keterkaitan Ke Depan (L+TL)		1.065216883	

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perolehan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung sektor pertanian hanya sebesar 1.065216883 (Juta Rp) atau di bawah nilai rata-rata total. Artinya setiap terjadinya kenaikan permintaan output oleh sektor hilir terhadap sektor pertaniannya sebesar 1 (Juta Rp), maka secara langsung dan tidak langsung sektor tersebut hanya mampu mendorong/ berdampak pada peningkatan output produksi total sektor hilirnya sebesar 1.065216883 (Juta Rp)). Hal ini mencerminkan bahwa total dampak sektor pertanian terhadap output sektor ekonomi lainnya masih termasuk rendah, yaitu tidak banyak output sektor pertanian yang dialokasikan kepada sektor hilirnya untuk kebutuhan input antara mereka.

3.2.5. Analisis Dampak Penyebaran Untuk 17 Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan diantara sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Karawang berdasarkan pada kemampuannya dalam mempengaruhi perkembangan sektor hulu (keterkaitan ke belakang) dan hilirnya (keterkaitan ke depan) sehingga menjadikannya sebagai sektor *leader* dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang (kuadran I). Kondisi tersebut juga memaknakan bahwa, apabila sektor industri mengalami kenaikan output maka output disektor lain juga akan ikut meningkat, dan apabila sektor lain mengalami peningkatan output maka sektor industri juga akan ikut meningkat.

Sebaliknya, sektor pertanian hanya berada pada kuadran III diagram dampak penyebaran karena kemampuannya dari segi keterkaitan ke belakang dan ke depan masih termasuk rendah, sehingga sektor ini perlu dorongan dan dukungan dari sektor lain. Hal ini juga mencerminkan bahwa, apabila sektor pertanian mengalami peningkatan output maka sektor lain tidak akan ikut meningkat outputnya, dan apabila sektor lain mengalami peningkatan output maka sektor pertanian tidak akan ikut meningkat outputnya.

4. Kesimpulan

Secara eksplisit, berdasarkan hasil analisis Input-Output matriks invers Leontief diketahui bahwa keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan industri pengolahan di Kabupaten Karawang sudah

saling terkait, baik keterkaitan ke belakang sektor industri terhadap sektor pertaniannya maupun keterkaitan ke depan sektor pertanian terhadap sektor industrinya. Namun demikian, secara garis besar kinerja keterkaitan ekonomi antara keduanya belum berjalan seimbang dalam perekonomian Kabupaten Karawang, yaitu peran sektor industri pengolahan jauh lebih mendominasi dibandingkan sektor pertaniannya dalam perekonomian Kabupaten Karawang, sebagaimana hasil analisis dampak penyebaran Input-Output Kabupaten Karawang yang menyatakan sektor industri sebagai sektor *leader* dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang karena memiliki kemampuan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang baik, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang perlu didorong oleh sektor lain karena kemampuan dari sektor tersebut lemah baik keterkaitan ke belakang maupun ke depan.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. (1999). *Pembangunan Agropolitan Dalam Rangka Desentralisasi Spatial Dengan Replikasi Sistem Kota-Kota Kecil Di Wilayah Pedesaan*. Jakarta: Makalah pada Seminar Sehari Pengembangan Agropolitan dan Agribisnis serta Dukungan Prasarana dan Sarana.
- Hulu, E. (1991). *Perbandingan Tingkat Keakuratan Beberapa Metode Pengestimasi Perubahan Koefisien Input-Output*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Kuswandi, A. (2012). *Pembangunan Wilayah Secara Berimbang*. Jurnal Kybernan.
- Prasetio, D. E. (2021). *PERAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*. MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Putra, I. M. (2021). *Pengembangan Wilayah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rachman, B. (1993). *Analisis Keterkaitan Antar Sektor Dalam Perekonomian Wilayah Jawa Barat*. Bogor: Jurnal Agro Ekonomi.
- S Murty. (2000). *Regional Disparties: Need and Measures for Balanced Development*. New Delhi: Rgional Planning and Sustainable Development. Kanishka Publishers, Distributors.
- Yanti Sofia, T. (2010). *Sektor Unggulan Di Kabupaten Sumedang Melalui Analisis Input Output*. Jurusan Statistika Universitas Islam Bandung.
- (2010). *RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025*. Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.
- (2022). *RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun Tahun 2022-2042*. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022.

Peran Iklim Usaha untuk Mendorong Inovasi Digital dan Peningkatan Kinerja Pengusaha Nahdliyin

The Role of Business Climate in Encouraging Digital Innovation and Improving the Performance of Nahdliyin Entrepreneurs

Rohmat Sarman¹, Azhar Affandi², Horas Djulius³

^{1,2,3} Program Doktor Ilmu Manajemen, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat
e-mail: ¹rohmatSarman@unpas.ac.id, ²azhar.affandi.dim@unpas.ac.id, ³horasdjulius@unpas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran iklim usaha dapat mendorong inovasi digital dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat, sehingga mereka dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian digital Indonesia. Di tengah persaingan digital yang meningkat, iklim usaha yang kondusif menjadi faktor penting yang mendorong adopsi inovasi digital sebagai upaya peningkatan daya saing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei yang melibatkan 400 pengusaha Nahdliyin. Data dianalisis melalui teknik *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi digital, yang pada gilirannya berdampak langsung pada peningkatan kinerja pengusaha. Efek mediasi inovasi digital memperkuat hubungan antara iklim usaha dan kinerja, menunjukkan pentingnya dukungan lingkungan bisnis yang stabil untuk meningkatkan kemampuan bersaing pengusaha. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung iklim usaha kondusif untuk memajukan inovasi dan kinerja UMKM, khususnya dalam konteks pengusaha berbasis keagamaan.

Kata kunci: Iklim Usaha, Inovasi Digital, Kinerja Pengusaha, Pengusaha Nahdliyin

ABSTRACT

This study examines how the role of business climate can encourage digital innovation and ultimately improve the performance of Nahdliyin entrepreneurs in West Java to become an important pillar in Indonesia's digital economy.. Amidst increasing digital competition, a conducive business climate is an important factor that encourages the adoption of digital innovation to increase competitiveness. The research method uses a quantitative approach with a survey involving 400 Nahdliyin entrepreneurs. Data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique to identify the relationship between variables. The results of the study indicate that the business climate has a positive and significant effect on digital innovation, which in turn has a direct impact on improving entrepreneur performance.

The mediating effect of digital innovation strengthens the relationship between business climate and performance, indicating the importance of supporting a stable business environment to enhance entrepreneurs' competitiveness. The conclusion of this study highlights the importance of policies that support a conducive business climate to advance MSME innovation and performance, especially in the context of religious-based entrepreneurs.

Keywords: *Business Climate, Digital Innovation, Entrepreneur Performance, Nahdliyin Entrepreneurs*

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan anggota G20, tengah menghadapi transformasi melalui Revolusi Industri 4.0 yang menuntut dunia usaha beradaptasi cepat agar tetap kompetitif (UNCTAD, 2023). Pemerintah telah mengembangkan strategi “Making Indonesia 4.0” untuk memperkuat daya saing nasional melalui adopsi teknologi digital, khususnya di sektor industri (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019; Schwab, 2017). Dalam konteks ini, UMKM memainkan peran signifikan karena menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB nasional (ASEAN Investment, 2022), di mana pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat menjadi salah satu komponen penting. Meskipun demikian, menurut survei Badan Pengusaha Nahdlatul Ulama (BPNU) pada 2022, sekitar 54,8% pengusaha Nahdliyin memiliki omzet di bawah Rp100 juta per tahun, yang menunjukkan skala usaha yang masih kecil dan kinerja belum optimal, dengan kontribusi hanya 10% terhadap perekonomian Jawa Barat (BPS, 2023). Selain itu, dimensi keagamaan yang rendah dalam praktik bisnis dengan skor rata-rata 3,067 dan visi bisnis berbasis Islam yang hanya dimiliki oleh 37,5% pengusaha menyoroti tantangan struktural dalam memperkuat nilai keagamaan dan inovasi (UGM, 2021). Tantangan dalam mengakses modal, teknologi, dan dukungan pemerintah juga menjadi faktor pembatas utama bagi pengusaha Nahdliyin dalam meningkatkan kinerja (Sarman et al., 2024). Dengan iklim usaha yang mendukung, pengusaha Nahdliyin dapat lebih efektif memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka, seperti melalui e-commerce dan aplikasi bisnis (McKinsey Global Institute, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran iklim usaha dapat mendorong inovasi digital dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat, sehingga mereka dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian digital Indonesia (del Olmo-García et al., 2023; Kreiterling, 2023).

Inovasi digital merupakan salah satu faktor krusial dalam persaingan bisnis di era digital, dengan kemampuan untuk menciptakan penawaran pasar baru, mengubah proses bisnis, dan mengembangkan model yang didorong oleh teknologi digital (Nambisan, et. al., 2017). Iklim usaha yang kondusif terbukti berperan penting dalam mendukung inovasi digital, terutama bagi UMKM yang memerlukan lingkungan yang ramah regulasi, akses modal yang memadai, dan infrastruktur pendukung untuk mempercepat adopsi teknologi (Alamsyah & Sari, 2022; Jelinek & Porter, 1990; Loo, 2019). Dalam hal ini, survei tahun 2022 dari Badan Pengusaha Nahdlatul Ulama (BPNU) menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat masih berada dalam skala usaha mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp100 juta, sehingga tantangan dalam hal modal dan pengetahuan digital menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing (BPS, 2023). Inovasi digital memungkinkan pengusaha Nahdliyin untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing usaha mereka, dan upaya ini sangat relevan bagi pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat yang terus beradaptasi dengan teknologi melalui platform e-commerce, media sosial, serta

pengembangan aplikasi bisnis, meskipun implementasinya masih di tahap awal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022). Menurut pra-survei tahun 2023 terhadap pengusaha Nahdliyin, inovasi digital mereka mencakup empat dimensi utama yaitu proses, produk, organisasi, dan keberlanjutan, dengan skor rata-rata menunjukkan bahwa inovasi digital mereka belum optimal dan masih menghadapi tantangan signifikan terkait kapabilitas teknologi (UGM, 2021). Selain itu, data BPS (2023), menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM Nahdliyin di Jawa Barat yang telah menerapkan teknologi digital secara signifikan dalam usaha mereka, yang menunjukkan bahwa iklim usaha yang mendukung perlu ditingkatkan agar dapat mendorong kapabilitas digital yang merata dan memperkuat kinerja usaha.

Iklim usaha yang kondusif memainkan peran penting dalam mendukung inovasi digital, terutama melalui penciptaan lingkungan yang aman, insentif untuk berinovasi, serta ekosistem yang mendukung adopsi teknologi baru (Wulandari, 2022). Menurut Kearney (2022), iklim usaha dapat mempengaruhi daya tarik wilayah untuk investasi, yang pada gilirannya memotivasi pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka melalui inovasi digital. Kondisi iklim usaha pada pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat, berdasarkan survei Lembaga Survei dan Penelitian Nahdlatul Ulama (LSPNU) Jawa Barat (2023), dinilai cukup positif, namun masih menghadapi tantangan seperti persaingan usaha yang ketat, kenaikan biaya produksi, dan perubahan tren pasar. Dimensi iklim usaha diukur melalui delapan aspek, antara lain kualitas sumber daya manusia, ketersediaan modal, dan infrastruktur, di mana aspek persaingan dan ketersediaan modal memperoleh skor cukup rendah, menunjukkan kebutuhan perbaikan yang signifikan pada aspek tersebut untuk mendukung inovasi (UGM, 2021). Studi oleh Alamsyah & Sari (2022) juga mengungkapkan bahwa iklim usaha yang mendukung dapat berupa ketersediaan infrastruktur dan akses terhadap sumber daya yang penting bagi inovasi. Sementara itu, laporan dari Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PSEBI) Universitas Indonesia (2022) mencatat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha Nahdliyin adalah akses terhadap modal dan teknologi. Dengan dukungan iklim usaha yang baik, pengusaha Nahdliyin dapat lebih mudah mengadopsi teknologi digital, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka dalam perekonomian yang semakin digital (OECD, 2022; World Bank, 2021).

Pemilihan pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat sebagai objek penelitian didasarkan pada peran strategis mereka dalam perekonomian regional serta potensi besar yang dimiliki untuk berkembang melalui inovasi digital. Jawa Barat, salah satu pusat kegiatan bisnis terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 1,5 juta pengusaha Nahdliyin yang terikat pada nilai-nilai keislaman dan budaya lokal, sebuah karakteristik yang memberikan daya tarik unik dalam dunia bisnis (PWNU, 2023). Berdasarkan pra-survei tahun 2023, ditemukan bahwa kondisi iklim usaha, inovasi digital, dan kinerja pengusaha Nahdliyin masih jauh dari optimal. Tabel survei pra menunjukkan bahwa faktor kapabilitas pengusaha, inovasi digital, dan iklim usaha masih dalam kategori kurang baik dengan skor rata-rata yang rendah pada dimensi-dimensi seperti ketersediaan modal, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi (LSPNU Jawa Barat, 2023). Kinerja usaha yang belum optimal ini sejalan dengan kondisi iklim usaha yang masih perlu perbaikan, di mana pengusaha Nahdliyin menghadapi persaingan ketat, kenaikan biaya produksi, dan keterbatasan dukungan teknologi (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan urgensi penelitian lebih lanjut, terutama karena kajian tentang inovasi digital di kalangan pengusaha berbasis keagamaan seperti Nahdliyin masih terbatas, dengan fokus penelitian yang seringkali hanya mencakup perusahaan besar. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap dalam literatur dengan mengkaji peran iklim usaha dalam mendorong inovasi digital untuk meningkatkan kinerja usaha pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat, yang secara

ekonomis cukup besar namun belum banyak dipelajari secara komprehensif (PSEBI Universitas Indonesia, 2022; UGM, 2021)

Dengan memperhatikan kesenjangan penelitian yang ada, studi ini berupaya mengisi kekosongan dengan menawarkan perspektif baru melalui analisis mendalam mengenai pengaruh iklim usaha terhadap inovasi digital dan dampaknya pada kinerja pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian empiris terhadap pengusaha Nahdliyin di wilayah Jawa Barat, yang selama ini belum banyak diteliti secara komprehensif dalam konteks inovasi digital. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung usaha mikro dan kecil dalam mengadopsi teknologi digital, mengatasi tantangan iklim usaha, serta meningkatkan kinerja usaha mereka sehingga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi regional dan nasional.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menyelidiki hubungan kausalitas antara iklim usaha, inovasi digital, dan kinerja pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat. Metode kuantitatif ini memungkinkan pengujian secara objektif terhadap hubungan antar variabel melalui pengukuran data yang sistematis dan empiris (Bougie & Sekaran, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Metode penelitian deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, luas, dan terperinci, tanpa manipulasi terhadap objek yang diteliti (Dj Julius, 2015). Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan *explanatory survey* yang memungkinkan peneliti menguji hipotesis secara sistematis dan menjelaskan hubungan kausal antara iklim usaha, inovasi digital, dan kinerja pengusaha Nahdliyin (Quinlan et al., 2018).

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat yang menjalankan bisnis menengah hingga besar di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Berdasarkan data PWNU Jawa Barat (2023), populasi pengusaha Nahdliyin mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Mengingat salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini ialah mengenai tingkat inovasi digital pada pengusaha, maka peneliti memilih skala usaha menengah ke atas yang berjumlah 20.236 pengusaha. Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* 5%, menghasilkan ukuran sampel sebesar 393, yang dibulatkan menjadi 400 pengusaha. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional cluster random sampling*, sebagaimana dijelaskan Lohr (2021) Teknik ini melibatkan pengelompokan populasi berdasarkan strata (dalam kasus ini didasarkan atas jenis usaha), sehingga sampel yang diambil dapat mencerminkan keragaman bisnis pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat.

2.2 Instrumen Penelitian

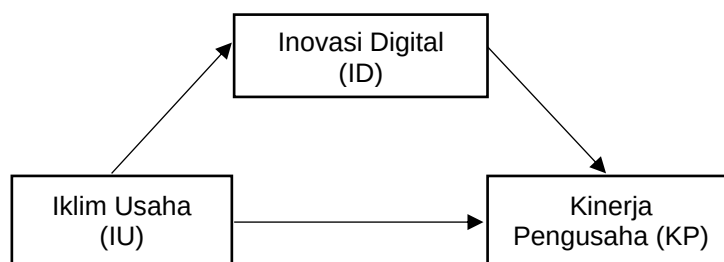
Instrumen penelitian ini berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur variabel iklim usaha, inovasi digital, dan kinerja pengusaha Nahdliyin dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah divalidasi dalam penelitian sebelumnya (Ghozali, 2021). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen, menggunakan uji Cronbach's Alpha untuk memverifikasi konsistensi internal kuesioner. Pengukuran masing-masing variabel dikembangkan berdasarkan teori yang diperoleh, dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi dan Operasional Variabel

Variabel dan Sumber	Definisi	Dimensi/Indikator
Iklim Usaha (IU) Muhammad Syafii Antonio (2022)	kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan lancar dan menguntungkan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Ketersediaan modal 3. Pemanfaatan Teknologi 4. Kualitas Manajemen 5. Kebijakan pemerintah 6. Kondisi ekonomi 7. Infrastruktur 8. Persaingan
Inovasi Digital (ID) Arif Budiman (2023)	"penggunaan teknologi digital untuk menciptakan produk, layanan, proses, atau model bisnis baru yang lebih baik dan efisien".	1. Tingkat otomatisasi 2. Tingkat kecerdasan 3. Tingkat integrasi 4. Tingkat inovasi produk 5. Tingkat kepuasan pelanggan 6. Tingkat penjualan 7. Tingkat adopsi Teknologi 8. Tingkat budaya inovasi 9. Tingkat kepemimpinan digital 10. Tingkat dampak lingkungan 11. Tingkat dampak sosial
Kinerja Pengusaha (KP) M. Syafii Antonio. (2018)	"suatu ukuran keberhasilan seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memenuhi aspek-aspek ekonomi, sosial, dan agama.	1. Laba Bersih 2. Pertumbuhan penjualan 3. Penciptaan lapangan kerja 4. Perlindungan dan pelestarian lingkungan 5. Keadilan dalam transaksi 6. Pertanggung-jawaban Sosial 7. Keberpihakan pada kaum lemah (al-ihsan) 8. Keberlanjutan (<i>al-mabadi' al-tsaminah</i>)

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan latar belakang, konsep, dan operasionalisasi di atas, penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2.3 Alat Analisis

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak Smart PLS 3.2.9, yang memungkinkan analisis komprehensif terhadap hubungan kausal antar variabel dalam model struktural yang kompleks (J. Hair et al., 2022). PLS-SEM dipilih karena keunggulannya dalam menangani variabel laten dan sampel besar serta untuk mengonfirmasi model teoritis yang diajukan (Fornell & Larcker, 1981; Rasoolimanesh, 2022). Ukuran sampel yang melebihi 200 dianggap ideal untuk analisis SEM,

sesuai dengan rekomendasi dari Siregar, et al. (2021), sehingga diharapkan analisis dapat memberikan hasil yang valid dan akurat terkait pengaruh iklim usaha terhadap inovasi digital dan kinerja pengusaha.

Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang kuat tentang bagaimana peran iklim usaha dapat mendorong inovasi digital dan pada akhirnya meningkatkan kinerja pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat, serta mendukung perumusan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

1. Analisis Deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (58,75%). Dari segi usia, pengusaha produktif berusia antara 36-50 tahun mendominasi kelompok responden (44,75%). Sebagian besar responden berpendidikan sarjana (31,25%) dan bergerak di sektor perdagangan (49,5%). Selain itu, rata-rata lama usaha yang dijalankan adalah ≤ 5 Tahun (35,50%), dan sebagian besar pengusaha Nahdliyin memiliki aset usaha berkisar antara Rp5 M hingga Rp10 M (43,25%). Detail lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Demografi (N=400)

Karakteristik	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	235	58.75%
Perempuan	165	41.25%
Kelompok Usia		
≤ 25 Tahun	11	2.75%
26 - 35 Tahun	105	26.25%
36 - 50 Tahun	179	44.75%
≥ 51 Tahun	105	26.25%
Tingkat Pendidikan		
SMP dan Setara	37	9.25%
SMA dan Setara	111	27.75%
Diploma I/II/III/IV	97	24.25%
Sarjana (S1)	125	31.25%
Magister (S2)	19	4.75%
Doktoral (S3)	11	2.75%
Jenis Usaha		
Perdagangan	198	49.50%
Industri	121	30.25%
Jasa	81	20.25%
Lama Usaha		
≤ 5 Tahun	142	35.50%
6 - 10 Tahun	108	27.00%
10 - 20 Tahun	97	24.25%
≥ 20 Tahun	53	13.25%
Aset Usaha		
Rp1.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00	172	43.00%
Rp5.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00	173	43.25%
$\geq$ Rp10.000.000.000,00	55	13.75%

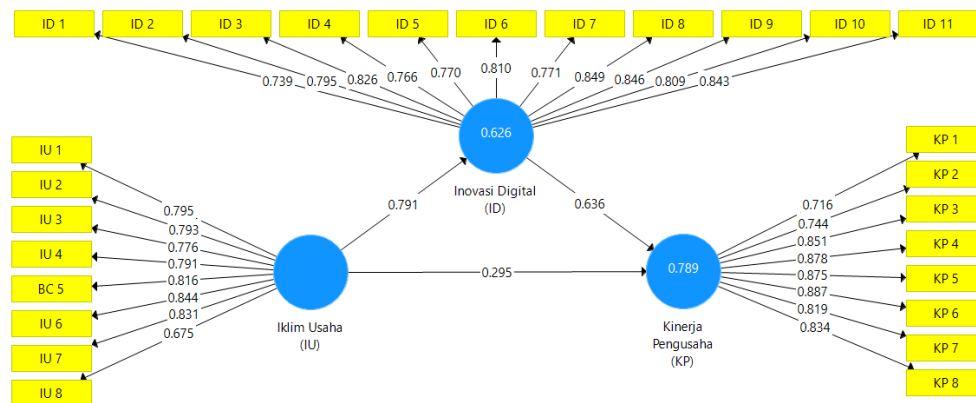
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

2. Analisis Verifikatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan SmartPLS versi 3.2.9. *Partial Least Square* (PLS) adalah analisis model persamaan struktural (SEM) dengan menggunakan variannya secara bersamaan melalui dua model evaluasi yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

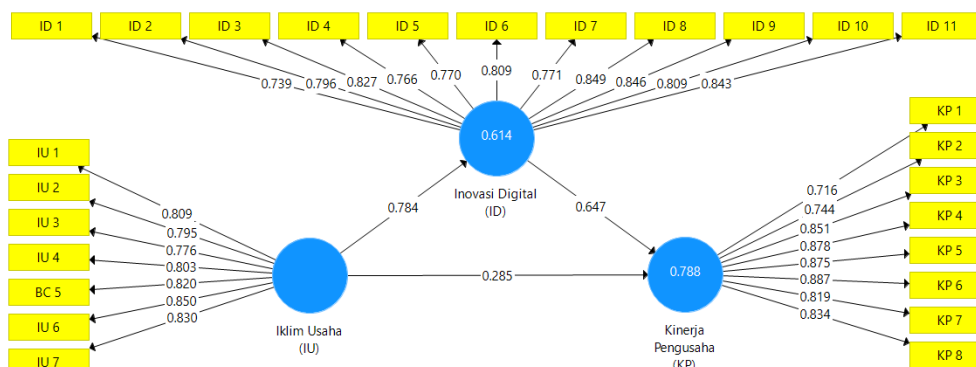
Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Berdasarkan model pengukuran pada gambar yang dilampirkan, struktur penelitian ini mengadopsi model reflektif untuk mengukur variabel *Iklim Usaha* (IU), *Inovasi Digital* (ID), dan *Kinerja Pengusaha* (KP). Mengacu pada kriteria evaluasi reflektif dari Hair et al. (2019, 2021), pengukuran model harus memenuhi faktor beban (*loading factor*) sebesar ≥ 0.7 untuk validitas indikator masing-masing, dengan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* minimal 0.7 untuk reliabilitas konsistensi internal, serta *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.50 untuk konvergensi validitas. Selain itu, validitas diskriminan harus dievaluasi menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) di bawah 0.90. Hasil evaluasi outer model untuk validitas dan reliabilitas serta koefisien jalur disajikan pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Hasil Evaluasi Outer Model

Sumber: Output SmartPLS, 2024



Gambar 3. Hasil Uji Outer Model

Sumber: Output SmartPLS, 2024

Convergent Validity

Pada Gambar 2, terdapat indikator yang dikeluarkan dari penelitian karena tidak memenuhi nilai yaitu IU 8 dengan beban rendah 0.675. Setelah masing-masing indikator variabel diturunkan, dapat dilihat pada Gambar 3 nilai loading factor ≥ 0.70 (valid). Oleh karena itu, validitas konvergen terpenuhi.

Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE. Konstruk dikatakan reliabel jika nilai AVE $> 0,50$, composite reliability $> 0,70$, dan cronbach's alpha $> 0,70$. Keluaran SmartPLS untuk composite reliability disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, and AVE

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Iklm Usaha (IU)	0,914	0,931	0,659
Inovasi Digital (ID)	0,945	0,952	0,645
Kinerja Pengusaha (KP)	0,933	0,945	0,685

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 3, seluruh konstruk memenuhi kriteria reliabilitas dengan baik. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap variabel berada di atas 0,50, menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel yang dimaksud. *Composite Reliability* juga menunjukkan nilai di atas 0,70 untuk ketiga variabel: *Iklm Usaha* (IU) dengan nilai 0,931, *Inovasi Digital* (ID) sebesar 0,952, dan *Kinerja Pengusaha* (KP) sebesar 0,945. Selain itu, nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel juga berada di atas 0,70, yaitu 0,914 untuk IU, 0,945 untuk ID, dan 0,933 untuk KP, yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang kuat antar item dalam satu konstruk. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi sesuai dengan standar evaluasi yang disarankan, sehingga dapat diandalkan dalam analisis lebih lanjut.

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Model penelitian memiliki discriminant validity yang baik jika nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk lebih besar dari setiap konstruk dalam model atau nilai Average Variance Extracted (AVE) $\geq 0,50$ (Hair et al., 2021). Serta nilai HTMT (Heterotrait Monotrait Ratio) dibawah 0.90 (Hair et al., 2019). Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Discriminant Validity

Matriks Fornell dan Larcker			
	IU	ID	KP
Iklm Usaha (IU)	0,812		
Inovasi Digital (ID)	0,784	0,803	
Kinerja Pengusaha (KP)	0,792	0,870	0,828
Matriks HTMT			
	IU	ID	KP
Iklm Usaha (IU)			
Inovasi Digital (ID)	0,835		
Kinerja Pengusaha (KP)	0,856	0,918	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE yang terdapat pada matriks Fornell dan Lacker adalah 0,812; 0,803; dan 0,831 lebih besar dari nilai setiap konstruk atau nilai akar kuadrat AVE $> 0,5$. Dapat dikatakan model pengukuran memiliki discriminant validity yang baik.

Kemudian hasil pengujian menunjukkan nilai HTMT dibawah 0.90 untuk pasangan variabel maka validitas diskriminan tercapai.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

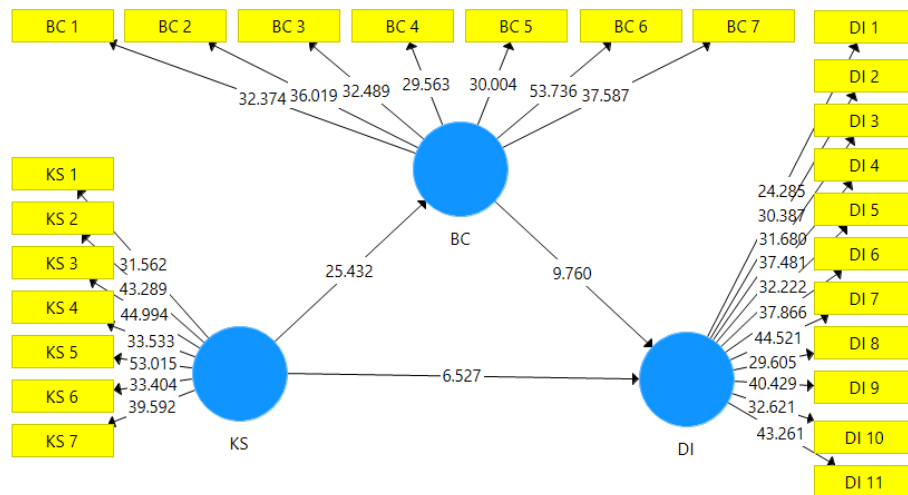
Evaluasi model struktural berfokus pada pengujian hipotesis terkait pengaruh antar variabel dalam penelitian. Seperti yang diuraikan oleh Hair et al. (2019), langkah pertama dalam evaluasi ini adalah memastikan tidak adanya multikolinearitas antar variabel, yang ditunjukkan oleh nilai Inner VIF (Variance Inflated Factor) di bawah 5. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95% pada parameter koefisien jalur. Pengaruh langsung antar variabel pada tingkat struktural diukur menggunakan nilai *f-square*, dengan interpretasi: 0.02 (rendah), 0.15 (moderat), dan 0.35 (tinggi). Untuk mengukur efek mediasi, digunakan statistik Upsilon V, yang diperoleh dari mengkuadratkan koefisien mediasi. Menurut Lachowicz et al. (2018) yang dijelaskan oleh Ogbeibu & Gaskin (2022) efek mediasi dikategorikan sebagai rendah (0.02), sedang (0.075), dan tinggi (0.175). Selain itu, evaluasi model juga mencakup nilai *R-square*, yang ditafsirkan berdasarkan kriteria Chin (1998) yaitu 0.19 (rendah), 0.33 (moderat), dan 0.66 (tinggi), serta nilai *Q-square* di atas 0 yang menunjukkan *predictive relevance* model (Hair et al., 2019). Hasil analisis dari evaluasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis/Pengujian Model Struktural

Hipotesis	Ptah Coefficient	P Values	95% Interval Kepercayaan Path Coefficient		Hasil Pengujian/ Sig?	VIF	F Square/ Upsilon V	R Square	Q Square
			Batas Bawah	Batas Atas					
Pengaruh Langsung									
H1. IU→ ID	0,784	0,000	0,736	0,822	Mendukung	1.000	1,594	0,614	0,610
H2. ID → KP	0,647	0,000	0,553	0,740	Mendukung	2.594	0,759	0,788	0,624
H3. IU → KP	0,285	0,000	0,189	0,385	Mendukung	2.594	0,147		
Pengaruh Tidak Langsung									
H4. IU → ID → KP	0,507	0,000	0,431	0,578	Mendukung	-	0,257	-	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5, evaluasi model struktural menunjukkan bahwa semua pengaruh antar variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk pengaruh langsung, H1 (pengaruh Iklim Usaha terhadap Inovasi Digital) memiliki koefisien jalur sebesar 0,784 dengan nilai *p* sebesar 0,000 dan *f-square* 1,594, menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan signifikan, serta memenuhi kriteria multikolinearitas dengan nilai VIF sebesar 1,000 (Hair et al., 2019). Selanjutnya, H2 (pengaruh Inovasi Digital terhadap Kinerja Pengusaha) memiliki koefisien jalur sebesar 0,647, juga signifikan pada *p* < 0,05 dengan *f-square* 0,759, yang mengindikasikan pengaruh moderat-tinggi. H3 (pengaruh langsung Iklim Usaha terhadap Kinerja Pengusaha) menunjukkan pengaruh yang lebih rendah dengan *f-square* 0,147 tetapi masih signifikan. Untuk pengaruh tidak langsung (H4), yaitu efek mediasi antara Iklim Usaha dan Kinerja Pengusaha melalui Inovasi Digital, koefisien mediasi adalah 0,507, signifikan dengan nilai Upsilon V sebesar 0,257, menunjukkan pengaruh mediasi yang kuat. Secara keseluruhan, nilai R-square yang tinggi (0,614 dan 0,788) menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik untuk variabel Kinerja Pengusaha dan Inovasi Digital, sesuai kriteria evaluasi Chin (1998). Nilai Q-square yang positif juga menunjukkan relevansi prediktif model (Hair et al., 2019).



Gambar 4. Hasil Awal Evaluasi Inner Model

Sumber: Output SmartPLS, 2024

3.2 Pembahasan

Hasil analisis hipotesis pertama, Iklim Usaha (IU) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inovasi Digital (ID), dengan kekuatan pengaruh yang sangat tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian OECD (2022) dan World Bank (2021) yang juga menunjukkan bahwa lingkungan bisnis yang mendukung memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan inovasi digital, khususnya dalam menciptakan kondisi yang aman bagi pengusaha untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Studi oleh Amit Singh, Rakhi Sharma, dan Ravi Sharma (2020) mengungkapkan bahwa faktor-faktor dalam iklim usaha seperti stabilitas politik, infrastruktur yang memadai, dan akses modal yang luas secara positif memengaruhi inovasi digital di perusahaan-perusahaan di India. Penelitian lain oleh Al-Harbi & Al-Anazi (2020) di Arab Saudi menegaskan pentingnya lingkungan usaha yang kondusif untuk mendorong adopsi digital di kalangan pengusaha. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan dari Arief & Nuryanti (2021) serta Fathurrohman & Astuti (2021), yang menemukan bahwa iklim usaha yang stabil membantu pengusaha, seperti Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat, untuk lebih berani berinovasi dan mengambil risiko dalam mengembangkan bisnis mereka. Namun, beberapa penelitian yang berbeda seperti Chen, Ming-Hsien (2015) dan Nguyen (2018), menemukan bahwa iklim usaha di beberapa negara Asia seperti Vietnam dan China tidak selalu signifikan dalam mendorong inovasi digital pada sektor manufaktur, kemungkinan karena perbedaan dalam konteks ekonomi dan kebijakan industri yang lebih ketat.

Kemudian Hipotesis kedua, menunjukkan bahwa inovasi digital secara signifikan meningkatkan kinerja pengusaha yang menunjukkan efek moderat-tinggi. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan bagi pengusaha, seperti yang diamati pada Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat yang memanfaatkan platform digital untuk ekspansi pasar dan efisiensi proses bisnis (Dutta & Mia, 2018; Huda et al., 2021; Kusumawardhani et al., 2020). Dalam konteks Islam, inovasi digital juga memiliki nilai strategis untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam, mendukung konsep “amar ma’ruf nahi munkar” melalui media digital untuk dakwah (Alharbi et al., 2022). Studi oleh Soto-Acosta et al. (2018) menggarisbawahi bahwa pengusaha yang berinovasi, baik melalui produk baru maupun teknologi, cenderung memiliki kinerja lebih baik karena peningkatan daya saing dan produktivitas.

Penelitian lain menunjukkan peran positif dari inovasi digital terhadap kinerja UKM (Alharbi et al., 2022; Kusumawardhani et al., 2020), namun beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa konteks atau sektor usaha dapat mempengaruhi dampak tersebut, seperti pada UMKM di penelitian Mila & Nurhidayah (2022) yang menemukan hasil tidak signifikan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya inovasi digital sebagai faktor utama peningkatan kinerja, namun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung konteks dan adaptasi teknologi oleh pengusaha.

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Iklim Usaha (IU) berpengaruh terhadap Kinerja Pengusaha (KP) dengan pengaruh signifikan namun relatif lebih rendah mengindikasikan bahwa dampak iklim usaha tidak sekuat inovasi digital namun tetap berperan dalam mendukung kinerja pengusaha. Meskipun pengaruhnya lebih rendah dibandingkan variabel lain namun tetap signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi iklim usaha yang kondusif dapat mendukung pencapaian kinerja pengusaha, meski tidak menjadi faktor utama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Al-Harbi & Al-Anazi (2020) yang menunjukkan bahwa iklim usaha yang stabil dan mendukung dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja usaha, khususnya melalui pengurangan hambatan birokrasi dan peningkatan akses terhadap infrastruktur. Studi lain yang dilakukan oleh Kusumawardhani et al. (2020) dan Huda et al. (2021), mengindikasikan bahwa stabilitas iklim usaha, yang meliputi kebijakan pemerintah dan akses pasar, berkontribusi positif terhadap kinerja bisnis dengan memberikan lingkungan yang lebih aman untuk investasi dan inovasi. Namun, hasil ini bertentangan dengan beberapa penelitian lain, seperti Mila & Nurhidayah (2022), yang menunjukkan bahwa dalam konteks UMKM di beberapa sektor tertentu, iklim usaha yang kondusif saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja secara signifikan tanpa dukungan inovasi atau sumber daya teknologi yang memadai. Perbedaan temuan ini mengisyaratkan bahwa meskipun iklim usaha yang baik penting, pengaruhnya terhadap kinerja pengusaha bisa bergantung pada faktor kontekstual lain, seperti tingkat adaptasi teknologi dan kapasitas manajemen pengusaha itu sendiri.

Sementara Hipotesis keempat, mengenai efek mediasi antara Iklim Usaha dan Kinerja Pengusaha melalui Inovasi Digital menunjukkan koefisien mediasi yang signifikan, yang mengindikasikan pengaruh mediasi yang kuat. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Dutta & Mia (2018) serta Kusumawardhani et al. (2020), yang menemukan bahwa inovasi digital dapat memperkuat hubungan antara iklim usaha yang mendukung dan peningkatan kinerja bisnis, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan efisiensi operasional. Namun, penelitian dari Mila & Nurhidayah (2022) menunjukkan perbedaan dalam konteks UMKM tertentu, di mana inovasi digital tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja tanpa dukungan penuh dari lingkungan usaha yang kondusif. Temuan ini menunjukkan bahwa sementara iklim usaha dan inovasi digital secara sinergis dapat meningkatkan kinerja, tingkat pengaruhnya mungkin berbeda tergantung pada konteks usaha dan kapasitas adopsi teknologi oleh pengusaha.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa iklim usaha yang kondusif berperan penting dalam mendorong inovasi digital dan meningkatkan kinerja pengusaha, khususnya di kalangan Pengusaha Nahdliyin di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa iklim usaha memberikan pengaruh positif langsung terhadap inovasi digital dengan koefisien jalur yang signifikan, yang memperkuat adopsi teknologi digital dalam proses bisnis. Selain itu, inovasi digital juga berdampak positif pada kinerja usaha, memungkinkan pengusaha menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Mediasi inovasi digital antara iklim usaha dan kinerja usaha menunjukkan

pengaruh yang kuat, mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi digital merupakan langkah krusial bagi pengusaha dalam meningkatkan daya saing. Dengan nilai *R-square* yang tinggi, model ini terbukti memiliki relevansi prediktif yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam konteks ini.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berfokus pada satu kelompok pengusaha di satu wilayah, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di wilayah lain atau sektor bisnis lainnya. Kedua, pendekatan kuantitatif yang digunakan terbatas dalam menggali faktor-faktor kontekstual yang mungkin memengaruhi hasil, seperti kebijakan pemerintah atau dinamika pasar lokal yang berubah. Terakhir, penelitian ini mengandalkan data survei yang dapat mengandung bias persepsi dari responden, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi aktual. Keterbatasan ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan pendekatan kualitatif atau uji lapangan yang lebih mendalam untuk validasi hasil.

Daftar Pustaka

- Al-Harbi, M., & Al-Anazi, M. (2020). The Impact of Business Environment on Digital Innovation: Evidence from Muslim Entrepreneurs in Saudi Arabia. *Journal of Business Research*, 122, 240–253.
- Alamsyah, A., & Sari, R. (2022). Pengaruh iklim usaha terhadap inovasi digital dan kinerja pengusaha: Studi pada UMKM di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 24(1), 1–12.
- Alharbi, N. A., Al-Hajri, S. A., & Al-Khatib, A. (2022). The Impact of Digital Innovation on Small and Medium Enterprises' Performance: The Moderating Role of Business Climate. *International Journal of Business Administration*, 13(2), 140–154.
- Antonio, M. Syafii. (2018). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. Syafii. (2022). *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arief, R., & Nuryanti, A. (2021). Pengaruh Iklim Usaha terhadap Inovasi Digital pada Pengusaha di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 24(2), 101–112.
- Arif Budiman. (2023). *Inovasi Digital: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- ASEAN. (2022). *ASEAN Investment Report 2022 - Pandemic Recovery and Investment facilitation* (Issue October). <https://asean.org/book/asean-investment-report-2022/>
- Badan Pengusaha Nahdlatul Ulama (BPNU). (2022). *Survei Pengusaha Nahdliyin 2022*. Jakarta: BPNU.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-building Approach* (8th Edition). Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=8RxOzQEACAAJ>
- Chen, Ming-Hsien, et al. (2015). The impact of institutional and business environment on firms' innovation in emerging economies: Evidence from China. *Research Policy*, 44(2), 470–482.
- del Olmo-García, F., Crecente-Romero, F. J., del Val-Núñez, M. T., & Sarabia-Alegria, M. (2023). Entrepreneurial activity in an environment of digital transformation: an analysis of relevant factors in the euro area. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 755. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02270-0>
- Dj Julius, H. (2015). *Metodologi penelitian sosial: pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dutta, S., & Mia, I. (2018). The Impact of Digital Innovation on Business Performance: The Moderating Role of Business Environment in Bangladesh. *Journal of Business Research*, 88, 413–420. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.021>
- Fathurrohman, M., & Astuti, D. (2021). Pengaruh Iklim Usaha terhadap Inovasi Digital pada Pengusaha Muslim di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 17(2), 113–126.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary*

- Journal*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Hair, J. J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th Editio). Cengage Learning, EMEA. <https://doi.org/10.1002/9781119409137.ch4>
- Huda, M. N., Soelistyowati, E., & Pratomo, S. (2021). Pengaruh Iklim Usaha dan Inovasi Digital Terhadap Kinerja Pengusaha. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 67–78.
- Jelinek, M., & Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. *Administrative Science Quarterly*, 37, 507. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54761826>
- Kearney. (2022). *Doing business 2023: Measuring business regulations for domestic firms in 190 economies*. Kearney.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022). *Menko Airlangga: Pengusaha Nahdliyin Memiliki Peran Sangat Strategis untuk Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Nasional Maupun di Tingkat Global*. Siaran Pers Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4227/menko-airlangga-pengusaha-nahdliyin-memiliki-peran-sangat-strategis-untuk-menjadi-motor-penggerak-ekonomi-nasional-maupun-di-tingkat-global>
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Making Indonesia 4.0 Kunci Industri Nasional Berdaya Saing Global di Era Digital*. Siaran Pers. <https://kemenperin.go.id/artikel/20065/Making-Indonesia-4.0-Kunci-Industri-Nasional-Berdaya-Saing-Global-di-Era-Digital>
- Kreiterling, C. (2023). Digital innovation and entrepreneurship: a review of challenges in competitive markets. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1), 49. <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00320-0>
- Kusumawardhani, D. A., Soepardi, A., & Pratomo, S. (2020). Pengaruh Inovasi Digital dan Iklim Usaha Terhadap Kinerja Pengusaha di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(2), 119–132.
- Lachowicz, M. J., Preacher, K. J., & Kelley, K. (2018). A novel measure of effect size for mediation analysis. *Psychological Methods*, 23(2), 244–261. <https://doi.org/10.1037/met0000165>
- Lembaga Survei dan Penelitian Nahdlatul Ulama (LSPNU) Jawa Barat. (2023). *Survei Kondisi Iklim Usaha Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat*. Bandung: LSPNU Jawa Barat.
- Lohr, S. L. (2021). *Sampling: Design and Analysis* (3rd Editio). CRC Press. <https://books.google.co.id/books?id=DahGEAAQBAJ>
- Loo, S. C. (2019). *he Digital Transformation of SMEs in Asia*. Springer.
- McKinsey Global Institute. (2018). *Digital Indonesia: How the digital economy can drive growth*. [https://bard.google.com/%3C0%3Ehttps://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our Insights/Unlocking Indonesias digital opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx](https://bard.google.com/%3C0%3Ehttps://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx)
- Mila, S., & Nurhidayah, S. A. (2022). Peran Literasi Finansial dan Inovasi Digital dalam Meningkatkan Business Performance dan Business Sustainability Pada UMKM di Kabupaten Pekalongan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 212–227. <https://doi.org/dx.doi.org/10.24217>
- Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., & Song, M. (2017). Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World. *Management Information Systems Quarterly*, 41(1), 223–238.
- Nguyen, Van Son, et al. (2018). The impact of business environment on firm innovation in developing countries: Evidence from Vietnam. *Journal of Business Research*, 102, 203–215.
- Nur Indah Sriayu Wulandari. (2022). *Pengaruh Literasi Digital dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha UMKM Pada Sentra Industri Kerajinan Rotan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon*. Universitas Komputer Indonesia.
- OECD. (2022). *The Innovation Policy Mix for Digitalisation*. Paris: OECD Publishing.
- Ogbeibu, S., & Gaskin, J. (2022). Back from the Future: Mediation and Prediction of Events Uncertainty through Event-Driven Models (EDMs). *FIIB Business Review*, 231971452211210. <https://doi.org/10.1177/23197145221121084>
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. (2023). *Data Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat*. Bandung: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat.
- Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PSEBI) Universitas Indonesia. (2022). *Studi Potensi dan Tantangan UMKM Nahdliyin di Jawa Barat*. Jakarta: PSEBI UI.
- Quinlan, C., Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2018). *Business Research Methods*. Cengage Learning, EMEA. <https://books.google.co.id/books?id=f4zaxQEACAAJ>
- Rasoolimanesh, S. M. (2022). Discriminant validity assessment in PLS-SEM: A comprehensive composite-

- based approach. *Data Analysis Perspectives Journal*, 3(2), 1–8.
- Sarman, R., Affandi, A., & Djulius, H. (2024). *STRATEGI BISNIS PENGUSAHA NAHDLIYIN: Mengungkap Rahasia Sukses Melalui Inovasi Digital dan Kolaborasi Pengetahuan* (R. K. Sari (ed.)). Klaten: Nas Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=mQYkEQAAQBAJ>
- Sarstedt, M., & Cheah, J.-H. (2019). Partial least squares structural equation modeling using SmartPLS: a software review. *Journal of Marketing Analytics*, 7(3), 196–202. <https://doi.org/10.1057/s41270-019-00058-3>
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/>
- Singh, A., Sharma, R., & Sharma, R. (2020). The Impact of Business Environment on Digital Innovation: Evidence from Hindu Entrepreneurs in India. *Journal of Business Research*, 122, 240–253.
- Siregar, Z. M. E., Perlaungan, A., Supriadi, Y. N., Ende, & Pristiyono. (2021). *Structural Equation Modeling: Konsep dan Implementasinya pada Kajian Ilmu Manajemen dengan Menggunakan Amos* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Soto-Acosta, P., Popa, S., & Martinez-Conesa, I. (2018). Information technology, knowledge management and environmental dynamism as drivers of innovation ambidexterity: a study in SMEs. *Journal of Knowledge Management*, 22(4), 824–849. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0448>
- UNCTAD. (2023). *Perdagangan dan Kewirausahaan di Indonesia: Dari Perspektif Gender dan Pembangunan*. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2021). *Studi Potensi dan Tantangan Pengembangan Kewirausahaan Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: UGM.
- World Bank. (2021). *Doing Business 2022: Measuring Business Regulations for Domestic Firms in 190 Economies*. World Bank Group.

Strategi Peningkatan Inovasi Daerah di Kabupaten Karawang *Strategy for Increasing Regional Innovation in Karawang Regency*

Rika Fauziah¹, Intan Kelana²

Bkpsdm Karawang, Universitas Buana Perjuangan Karawang

e-mail: rika.fauziah@karawangkab.go.id, mn22.intankelana@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Inovasi daerah di Kabupaten Karawang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan serta daya saing daerah. Melalui berbagai inisiatif dan program, pemerintah daerah berupaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis berbagai inovasi daerah yang diterapkan di Kabupaten Karawang, termasuk dalam sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan teknologi digital. Berdasarkan kajian literatur, inovasi-inovasi tersebut terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan serta pemberdayaan masyarakat, meskipun terdapat kendala yang perlu diperbaiki, seperti minimnya informasi dikalangan masyarakat dan keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pengembangan inovasi daerah yang lebih efektif di masa depan, guna mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Inovasi Daerah, Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah

ABSTRACT

Regional innovation in Karawang Regency is a strategic step to improve the quality of public services and government effectiveness as well as regional competitiveness. Through various initiatives and programs, the local government seeks to improve efficiency in governance and meet the increasingly complex demands of society. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze various regional innovations implemented in Karawang Regency, including in the public service, infrastructure, and digital technology sectors. Based on the literature review, these innovations have proven to have a positive impact on improving services and community empowerment, although there are obstacles that need to be improved, such as the lack of information among the community and limited digital infrastructure. This research aims to provide recommendations for the development of more effective regional innovations in the future, in order to support bureaucratic reform and realize better governance that is adaptive to the needs of the community.

Keywords: *Regional Innovation, Public Services, Regional Competitiveness*

1. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi bertujuan untuk memodifikasi praktik-praktik pemerintahan untuk menciptakan sistem yang kompetitif yang memungkinkan organisasi publik mencapai kinerja yang baik. Hal ini akan membutuhkan banyak inovasi untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan sebaik mungkin di era modern. Menurut Vries, Bekkers, dan Tummers (2015) dalam (Budiman et al., 2021), setiap inovasi dalam pemerintahan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, inovasi dalam manajemen pemerintahan juga akan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan. Pada saat yang sama, setiap inovasi akan berdampak pada kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Inovasi Daerah adalah segala bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, hal ini mendukung upaya peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan hukum lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan penduduk dapat mengakses berbagai layanan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pusat mendorong seluruh daerah, termasuk Kabupaten Karawang, untuk mengimplementasikan inovasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini menekankan pentingnya pengembangan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan dan keterbatasan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan berbagai inovasi daerah yang mencakup pelayanan publik, infrastruktur dan teknologi digital. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang juga berfokus ada pemberdayaan masyarakat melalui program yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan. Namun, dari strategi yang telah dijalankan, jumlah inovasi yang memenuhi indikator untuk diperlombakan masih dirasa kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya inovasi telah dilakukan terdapat tantangan dalam memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar penilaian nasional. Strategi inovasi yang telah dirancang dan diimplementasikan sebenarnya sudah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa aspek, tetapi masih diperlukan upaya yang lebih terarah dan sistematis untuk mengoptimalkan hasil tersebut.

Peningkatan ini menjadi penting, terutama untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karawang, yang merupakan indikator kunci dalam menilai sejauh mana inovasi daerah mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan serta daya saing wilayah secara keseluruhan. Sebagaimana telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terkait inovasi daerah.

Salah satu contoh yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin dan Fuady mengenai Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) di Kota Palopo ini membahas upaya meningkatkan sistem inovasi daerah melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan metode deskriptif dan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi adalah proses terstruktur yang mencakup inovasi produk, proses, layanan, strategi, dan sistem, bertujuan untuk meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dalam pemerintahan. Solusi yang diusulkan meliputi pembentukan kerangka kerja regulasi untuk mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran Balitbangda. Kesimpulan menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung Balitbangda sebagai pusat penelitian dan inovasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fitriati mengenai Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020-2022). Dengan metode kualitatif melalui wawancara dan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa Palembang berhasil menjadi salah satu kota paling inovatif di Indonesia, mencapai peringkat keempat dalam Innovative Government Award 2020. Penerapan strategi berbasis lima aspek: komitmen pemerintah daerah, tujuan yang jelas, analisis lingkungan, peningkatan pelayanan publik, dan kolaborasi dengan akademisi serta masyarakat, ini berhasil meningkatkan daya saing daerah. Roadmap SIDA digunakan sebagai panduan pembangunan berbasis inovasi, dengan evaluasi berkala untuk mendukung keberlanjutan program.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas strategi yang dilakukan oleh Litbang Bappeda Kabupaten Karawang. Diharapkan dengan mengetahui dampak yang terjadi, dapat mendapatkan rekomendasi inovasi baru yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Beberapa peraturan terkait landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

1. UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 386: dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah PEMDA dapat melakukan inovasi.
2. PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah
Pasal 1: Inovasi Daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri 104/2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
Pasal 1: penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan Indikator Index Inovasi Daerah.
4. Perbup 72/2020 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

PNS yang mendapatkan promosi jabatan wajib membuat inovasi di jabatan barunya dan atasan langsung PNS tersebut melakukan mentoring pelaksanaan inovasi dan dapat dibimbing oleh Widyaiswara.

2. Metodologi

Sistematika literatur review atau Systematic Literature Review (SLR) adalah metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. SLR bertujuan untuk: Mengetahui status terkini pengetahuan tentang topik penelitian, Mengidentifikasi celah dalam literatur, Menentukan arah penelitian selanjutnya. SLR dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari hal-hal yang mendasar, kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang lebih kompleks. Hasilnya akan lebih detail, akurat, dan kompleks, sehingga peneliti bisa mendapatkan landasan teori yang berkualitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Inovasi Daerah Kabupaten Karawang

INOVASI	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SKEMA INOVASI	HASIL & DAMPAK	KEKURANGAN
Semprong klari (Layanan Sertifikasi mandiri perorangan dalam waktu satu hari)	Kementrian agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pertanahan yang efisien dan efektif. Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, diperlukan inovasi untuk mempercepat proses pendaftaran tanah dan meningkatkan tranparansi.	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pertahanan 2. Mempercepat proses sertifikasi tanah 3. Meningkatkan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui peningkatan volume pelayanan	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pertahanan 2. Mempercepat proses sertifikasi tanah 3. Meningkatkan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui peningkatan volume pelayanan	1. Peningkatan kepuasan masyarakat, dengan indeks kepuasan menjadi 98,92 poin 2. Proses sertifikasi tanah menjadi lebih cepat dan transparan 3. Peningkatan PNBP yang signifikan Dampak 1. Masyarakat bisa mandiri dalam mengurus sertifikasi tanah 2. Mengurangi praktik percaloan 3. Meningkatkan kepercayaan publik pada layanan pemerintah	1. Minim informasi dikalangan masyarakat 2. Belum semua wilayah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung layanan digital 3. Tidak adanya Peraturan Bupati dan peraturan lain yang menjaga keberlanjutan inovasi daerah 4. Tidak adanya SOP

Inovasi pelayanan publik E-Dukcapil	Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik diharuskan mengelola sistem informasi yang efisien. Selain itu, kondisi pandemi dan keterbatasan mobilitas masyarakat juga menjadi faktor pendorong untuk mengembangkan layanan online.	Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan, bagi masyarakat yang memiliki kesulitan datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL maupun untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan.	1. Pelayanan offline • Pelayanan integrasi, masyarakat datang langsung ke kantor. • Pelayanan kecamatan. • Mall Pelayanan Publik, kerjasama dengan berbagai dinas untuk menyediakan layanan di pusat perbelanjaan . • Dukcapil Ada Untukmu (DAU), pelayanan jemput bola untuk lansia dan disabilitas. • Pelayanan jemput bola, pelayanan langsung ke rumah masyarakat. 2. Pelayanan online • E-Dukcapil, website pelayanan yang menyediakan berbagai layanan seperti pembuatan	Inovasi pelayanan E-Dukcapil berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja, dan dari mana saja, yang mengurangi antrian dan waktu tunggu. Dampak 1. Proses administrasi jadi lebih cepat dan transparan 2. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk mengakses layanan kini dapat melakukannya secara gratis 3. Pendapatan negara bukan pajak dari layanan administrasi meningkat	1. Masih banyak yang belum mengetahui E-Dukcapil 2. Beberapa daerah mengalami kendala internet 3. Tidak adanya penetapan
--	--	--	--	--	--

			KTP, KK, dan akta kelahiran tanpa datang ke kantor.		
Tanggap Karawang atau Tangkar	Banyaknya pengaduan dari masyarakat karawang yang belum tertampung dengan baik, menyebabkan aspirasi masyarakat tidak terkelola secara sistematis. Didorong oleh peraturan dan undang-undang terkait pelayanan publik, pemerintah daerah merasa perlu meningkatkan kualitas layanan dan keterlibatan masyarakat.	1. Menampung dan mengelola pengaduan masyarakat dengan cara yang lebih efisien dan transparan. 2. Meningkatkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan publik.	1. Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, memudahkan masyarakat dalam mengajukan pengaduan. 2. Sistem pengelolaan (Diskominfo) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Sosialisasi dilakukan di berbagai media untuk memberikan edukasi tentang dan adanya aplikasi tangkar ini	1. Total pengaduan yang diterima pada tahun 2024 mencapai 10,988 dengan 10.450 diantaranya berhasil ditindak lanjuti. 2. Masyarakat merasa aplikasi ini cukup membantu dalam menyampaikan aspirasi mereka tanpa harus datang ke Kantor.	1. Keterbatasan sumber daya mulai dari dukungan finansial dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. 2. Tidak adanya penetapan mengenai Tanggap Karawang

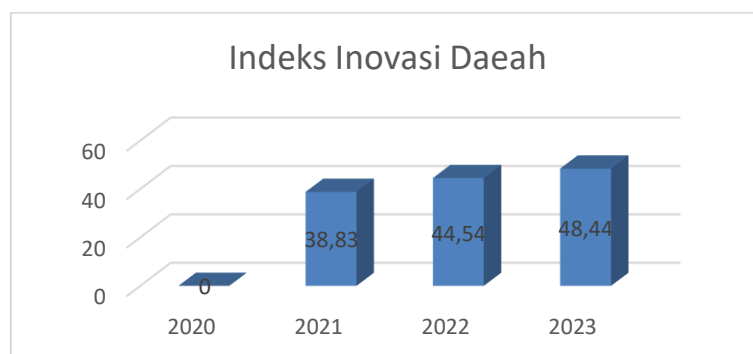
Sumber: Penulis, 2024

Untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karawang, inovasi seperti Semprong Klari, E-Dukcapil, dan Tangkar perlu mengatasi kekurangan seperti kurangnya informasi, infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan sumber daya. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi yang telah lebih sukses dalam penerapan inovasi dengan infrastruktur yang mendukung dan regulasi (Perbup Banyuwangi No 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi No 59 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi) yang jelas, Karawang perlu fokus pada perbaikan sosialisasi, infrastruktur dan penyusunan regulasi agar inovasi dapat berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar, lebih jauh lagi dengan inovasi daerah juga dapat meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karawang.

3.2 Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing, salah satunya melalui inovasi. Inovasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek), merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis dari ilmu pengetahuan baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke dalam produk atau proses produksi. Beberapa ahli juga mengartikan inovasi sebagai eksploitasi yang sukses dari suatu ide baru, perubahan dalam organisasi yang mencakup kreativitas untuk menghasilkan produk, jasa, ide, atau proses baru, baik yang ada dalam organisasi maupun yang berasal dari luar organisasi, serta sebagai alat untuk memanfaatkan perubahan dalam bisnis secara berbeda (Rosenfeld 2002, Anatan dan Ellitian 2009, dan Drucker 2012) dalam (Nisa, 2022).

Indeks daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, merupakan kumpulan variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah dalam periode tertentu. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas penilaian inovasi daerah ini, sekaligus memberikan penghargaan yang berhasil melaksanakan inovasi. Pemberian insentif ini bertujuan memotivasi daerah untuk terus berinovasi yang dilakukan akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Indeks Inovasi Daerah

Sumber: Kemendagri, 2021-2023

Pada tahun 2023, Kabupaten Karawang mendapat predikat “Kabupaten Inovatif” Indeks Inovasi Daerah sebesar 48,44, dan diharapkan pada tahun 2024 akan mengalami peningkatan untuk mencapai predikat “Kabupaten Sangat Inovatif dan Berkelanjutan” (Bahan Paparan Litbang Bappeda Kabupaten Karawang Tahun 2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 mengatur tentang Inovasi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada tiga sasaran utama: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inisiatif inovasi dapat diajukan oleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, atau masyarakat. Setiap usulan inovasi harus disertai dengan proposal yang mencakup rancang bangun inovasi, tujuan, manfaat, waktu uji coba, dan anggaran. Proses evaluasi

dilakukan oleh tim independen yang menilai kelayakan inovasi sebelum disetujui oleh kepala daerah untuk diuji coba.

Selain itu, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan (Bahan Paparan Litbang Bappeda Kabupaten Karawang Tahun 2023). Inovasi daerah dapat dimaknai sebagai sebuah ide, gagasan, praktek ataupun suatu objek yang dapat dikatakan dan dianggap sesuatu yang baru bagi individu atau kelompok. Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi disektor publik.

Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah menurut Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri - BRIN

- 1) Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah.,
- 2) Penataan basis data riset dan inovasi.,
- 3) Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi.,
- 4) Penyediaan anggaran riset dan inovasi., dan
- 5) Peningkatan perlindungan dari pemanfaatan kekayaan intelektual.

Proses sirkular inovasi menurut Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri - BRIN

- 1) Proses kreativitas (*Creativity*).,
- 2) Proses penemuan baru (*Invention*).,
- 3) Proses Komersialisasi (*Commercialization*)., dan
- 4) Proses Destruktif Kreativitas (*Creative Destruction*)

Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan beberapa kegiatan tentang inovasi daerah diantaranya:

A. Pekan Penelitian dan Inovasi Daerah (PERIODA)

Pekan Penelitian dan Inovasi Daerah (PERIODA) yang diselenggarakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk memamerkan hasil penelitian dan pencapaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diperoleh oleh komunitas akademik UBP Karawang. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hasil penelitian, tetapi juga bertujuan untuk membangun ekosistem penelitian dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Dalam bidang inovasi, UBP Karawang telah berhasil dalam pencapaian HKI, yang menunjukkan komitmen dan kontribusi besar dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi.

UBP Karawang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan Perioda. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan inovasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah. Dukungan penuh dari Bappeda ini menjadi faktor penting dalam kemajuan penelitian dan inovasi di daerah. Dengan dukungan ini diharapkan Karawang dapat terus meningkatkan daya saingnya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penelitian dan inovasi yang relevan.

B. Tim Pelaksana *Coaching* dan *Mentoring* Riset dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam riset dan inovasi. Fokusnya adalah menciptakan budaya inovasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan kompetensi ASN. Tujuan dari program ini meliputi peningkatan kapasitas SDM, fasilitas inovasi dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Tim Pelaksana *Coaching* dan *Mentoring* Riset mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu pelaksana riset dan pengusul inovasi, baik yang berasal dari kalangan ASN maupun non-ASN dalam menggali potensi., dan
- 2) Memberikan saran perbaikan, pengayaan materi, hingga pendanaan pengembangan riset dan inovasi.

Kelebihan dan Kekurangan Tim Pelaksana *Coaching* dan *Mentoring* Riset dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 1) Kelebihan
 - a. Membantu membangun kepercayaan diantara semua pegawai.,
 - b. Meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan.,
 - c. Pegawai menjadi individu yang lebih mandiri.,
 - d. Pegawai dapat berkontribusi secara lebih efektif kepada tim dan organisasi.,
 - e. Mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar untuk tindakan dan komitmen yang dilakukan pegawai.,
 - f. Bekerja dengan lebih mudah dan produktif., dan
 - g. Berkomunikasi dengan lebih efektif.
- 2) Kekurangan
 - a. Proses *coaching* membutuhkan banyak waktu dalam satu kegiatan.,
 - b. Pelaksanaan *coaching* membutuhkan komunikasi dua arah dari sisi *coach* dan *coachee*., dan
 - c. Memerlukan hubungan baik antara *coach* dan *coachee* selama proses *coaching*.

C. Sahabat Riset dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang

SABRINA adalah inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mendorong riset dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas riset, mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, dan membangun kolaborasi antara pemerintahan, sosial, ekonomi, serta teknologi dan inovasi.

Tim Sahabat Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

- 1) Membantu mengusulkan dan mematangkan rencana riset dan inovasi sesuai kebutuhan Perangkat Daerahnya masing-masing., dan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi yang ada diperangkat daerahnya dengan instansi pengelolaan riset dan inovasi daerah tingkat kabupaten sehingga dapat ditindak lanjuti melalui implementasi, publikasi ilmiah, kompetisi hingga pendanaan pengembangan.

D. Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Penanganan Isu Strategis Di Kabupaten Karawang

Program Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Penanganan Isu Strategis Di Kabupaten Karawang ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur penelitian untuk menghadapi tantangan modern. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan dan mentoring profesional untuk meningkatkan keterampilan riset dan inovasi. Program ini mendorong inovasi dengan mengadakan kompetisi riset dan inovasi, serta seminar dan expo untuk mempromosikan hasil-hasil riset. Selain itu, program ini juga membangun sinergi dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem riset yang kuat.

E. Community of Practice (COP) Inovasi Daerah Bekerja Sama dengan BKPSDM

Community of Practice adalah komunitas yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau minat yang sama. Dalam CoP, anggota komunitas akan saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyelenggarakan beberapa kegiatan CoP, di antaranya:

- 1) CoP edisi X yang mengangkat tema menulis dalam menjaga eksistensi Widyaiswara. Tema ini dipilih karena banyak Widyaiswara yang kesulitan menuangkan pemikirannya melalui tulisan., dan
- 2) CoP yang mengangkat tema *Learning Agility* untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) milenial. Dalam *Learning Agility* dan *Learning on Demand*, pola pembelajaran menjadi lebih lincah dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kesimpulan

Inovasi di Kabupaten Karawang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor, hal ini terlihat dari peningkatan nilai Index Inovasi Daerah yang terus meningkat. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendorong inovasi melalui kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selain inovasi berbasis digital, pemerintah juga perlu mendorong inovasi-inovasi non-digital.

Secara keseluruhan, inovasi-inovasi ini berpotensi besar untuk mendukung transformasi Kabupaten Karawang menjadi wilayah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan inovasi ini memerlukan dukungan terus-menerus dari berbagai pemangku kepentingan serta pengembangan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Saran

- Inovasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 38/2017 pasal 20 tentang inovasi daerah. Untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah sehingga dengan adanya penetapan tersebut dapat ditugaskan perangkat daerah ditempatkan sesuai dengan bidangnya;

- Lebih banyak melibatkan institusi untuk riset agar bisa membuat inovasi nya berbasis riset;
- Penyebaran informasi agar program inovasi daerah yang sudah dibuat dapat tersebar luas ke masyarakat di pedesaan;
- Melibatkan institusi pendidikan untuk menumbuhkan inovasi-inovasi berbasis riset;
- Pemerintah daerah menyediakan media sosialisasi yang lebih variatif sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas;
- Meningkatkan kolaborasi diantara pemerintah daerah, swasta, akademisi, unsur masyarakat dalam menjalankan program inovasi.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, Aryani, L., & Rahman. (2024). *TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN*. 5(4), 6654–6659.
- Amri, U., Adiarto, & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
- Anggreni, N., & Purnamasari, H. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Ceta. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2009–2014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Budiman, S., Kurniadi, D., Matridi, R. A., Jenawi, B., & Junriana, J. (2021). Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 112–126. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1839>
- Fitriati, R., & Putra, M. G. (2023). Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 308–326. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3190>
- Kepbup_Tim_Coaching_dan_Mentoring[1].PDF*. (n.d.).
- Lusiana, & Suryani, M. (2018). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>
- Matridi, R. A., Budiman, S., Ferizone, Rianto, F., Setyadiharja, R., & Kurniadi, D. (2021). *Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan*. 04(02), 91–102.
- Ningrum, W. P., Kurniansyah, D., & Azijah, D. N. (2024). *ANALISIS KEBERHASILAN APLIKASI TANGGAP KARAWANG SEBAGAI PERWUJUDAN RUANG PENGADUAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI. 10*, 497–510.
- Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH*. (2017). 1–37. http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PP_Nomor_38_Tahun_2017.pdf
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)) Triana. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647.
- SAMPURNO, A. F. D. (2016). *OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)*. 1–23.
- Setjen DPR RI. (2022). *Reformasi Birokrasi: Berkomitmen Mensukseskan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI*.
- SK_Bupati_Karawang_tentang_Tim_Sabrina[1].pdf*. (n.d.).
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Tan, M. (2019). Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri*, 33.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. (2014). *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.

(Alfiansyah et al., 2024; Amri et al., 2022; Anggreni & Purnamasari, 2022; Budiman et al., 2021; Fitriati & Putra, 2023; *Kepbup_Tim_Coaching_dan_Mentoring[1].PDF*, n.d.; *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH*, 2017; *SK_Bupati_Karawang_tentang_Tim_Sabrina[1].Pdf*, n.d.; “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,” 2014; Lusiana & Suryani, 2018; Matridi et al., 2021; Ningrum et al., 2024; Nisa, 2022; Rahmawati et al., 2014; SAMPURNO, 2016; Setjen DPR RI, 2022; Syamsuddin & Fuady, 2020; Tan, 2019)

Menghadapi Tantangan Global Strategi “Kedaulatan Ekonomi” untuk Pengentasan Kemiskinan di Karawang

Facing Global Challenges “Economic Sovereignty” Strategies for Poverty Alleviation in Karawang.

Septiyana Razak Priyatna¹

¹Septiyana Razak Priyatna, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: septiyanarazak009@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi tantangan kompleks dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, Indonesia, meskipun daerah ini merupakan pusat industri nasional dan internasional. Manfaat ekonomi dari pertumbuhan pesat dan investasi asing sering kali tidak merata, terutama di wilayah pesisir utara seperti Pakisjaya, yang masih rentan terhadap kemiskinan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab kemiskinan, termasuk ketergantungan pada industri besar, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, infrastruktur yang tidak memadai, serta ketimpangan pendapatan. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menelaah penerapan konsep kedaulatan ekonomi sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, serta sektor perikanan dan pertanian lokal, kedaulatan ekonomi mendorong inklusivitas dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada modal asing sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Penelitian ini juga mengevaluasi tren Gini Rasio dan indeks kemiskinan di Karawang, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan serta peluang untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Rekomendasi menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Kedaulatan Ekonomi, Kemiskinan, Karawang, Sektor Perikanan

ABSTRACT

Poverty remains a persistent and complex challenge in Karawang Regency, Indonesia, despite its position as a hub for national and international industries. The economic benefits of rapid growth and foreign investments are often unevenly distributed, particularly in northern coastal areas like Pakisjaya, where vulnerability to poverty remains high. This study explores the factors contributing to poverty, including dependency on large-scale industries, limited access to education and vocational training, inadequate infrastructure, and income disparities. Utilizing a qualitative approach with descriptive analysis, the research examines the implementation of economic sovereignty as a strategy to address these issues. By empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs), cooperatives, and local fisheries and agriculture, economic sovereignty fosters inclusivity and sustainability. The findings suggest that optimizing local resources and strengthening community participation can reduce dependency on foreign capital while promoting equitable development. The research also evaluates the Gini Ratio trends and poverty indexes in Karawang, highlighting policy gaps and opportunities for local economic empowerment. Recommendations emphasize leveraging

local potential to create a balanced economic ecosystem, contributing to poverty alleviation in Karawang Regency.

Keywords: *Economic Sovereignty, Poverty, Karawang, Fisheries Sector*

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan yang kompleks dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional dan internasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya investasi asing telah menciptakan peluang kerja, distribusi hasilnya sering kali tidak merata, terutama di daerah pesisir utara seperti Pakisjaya. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut masih terpuruk dalam kondisi rentan dengan kemiskinan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Karawang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, tingginya ketergantungan pada sektor industri besar dan modal asing menyebabkan masyarakat lokal kesulitan mengakses peluang ekonomi yang inklusif. Kedua, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional di daerah tertentu membuat sebagian penduduk kurang memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Ketiga, infrastruktur di wilayah pesisir yang kurang memadai, seperti akses jalan dan pasar, menghambat pengembangan sektor perikanan dan pertanian. Faktor ini semakin diperburuk oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang membuat masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan.

Dalam konteks ini, penerapan konsep kedaulatan ekonomi menjadi relevan sebagai strategi untuk membangun kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal secara efektif. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam perekonomian, baik melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun optimalisasi potensi sumber daya lokal seperti sektor perikanan dan pertanian.

Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dirumuskan oleh Mohammad Hatta, dapat menjadi landasan bagi pengembangan kedaulatan ekonomi di Kabupaten Karawang. Prinsip kebersamaan dan gotong royong, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menjadi dasar dalam mendukung pengembangan koperasi syariah. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan bagi hasil.

Meskipun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari 7,87% pada Maret 2023 menjadi 7,86% pada Maret 2024, peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 540 orang pada periode yang sama mencerminkan adanya tantangan yang masih harus diatasi. Selain itu, peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,06 pada Maret 2023 menjadi 1,18 pada Maret 2024, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,22 menjadi 0,28, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab kemiskinan di Kabupaten Karawang secara mendalam dan mengeksplorasi penerapan konsep kedaulatan ekonomi sebagai solusi yang relevan. Dengan memberdayakan UMKM, koperasi syariah, dan sektor perikanan serta pertanian, Kabupaten Karawang memiliki peluang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk menggali hubungan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan penerapan kedaulatan ekonomi di Kabupaten Karawang. Melalui penelitian ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi landasan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif.



Gambar 1. Infografis Indeks Kemiskinan Di Kabupaten Karawang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2024

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Karawang pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 597.345 per kapita per bulan, yang meningkat sebesar Rp 41.456 dibandingkan dengan GK pada Maret 2023 sebesar Rp 555.889. Meskipun terjadi peningkatan pada garis kemiskinan, dinamika kemiskinan di Karawang, khususnya di daerah pesisir utara seperti Pakisjaya, masih dipengaruhi oleh rendahnya pengelolaan sektor perikanan oleh masyarakat lokal. Banyak nelayan menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap alat tangkap modern, teknologi pengolahan hasil laut, dan pemasaran produk perikanan. Hal ini membuat mereka sulit bersaing dan lebih rentan terhadap eksploitasi oleh tengkulak maupun pengaruh eksternal lainnya. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik menjadi 1,18 pada Maret 2024 dari 1,06 pada Maret 2023, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat menjadi 0,28 pada Maret 2024 dari 0,22 pada Maret 2023.

Peningkatan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar. Dalam konteks ini, sektor perikanan sebagai salah satu potensi utama Kabupaten Karawang perlu dikelola secara optimal dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dan didukung oleh pemerintah melalui kebijakan strategis. Konsep Kedaulatan Ekonomi dapat menjadi pendekatan kunci, dengan memberikan masyarakat pesisir akses terhadap pelatihan, bantuan teknologi tangkap dan olahan, serta pendampingan dalam memperluas pasar. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing maupun aktor eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai penguatan sektor perikanan berbasis masyarakat lokal dan sinergi pemerintah sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk menggali lebih dalam peran sektor perikanan dalam membangun kemandirian ekonomi di Karawang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep “Kedaulatan Ekonomi” dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana kebijakan lokal dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan?

Tujuan Penelitian

“Kedaulatan ekonomi” adalah konsep yang menekankan pentingnya kemandirian dan kontrol dalam perekonomian, baik di tingkat komunitas maupun individu di suatu daerah. Konsep ini menggarisbawahi peran sumber daya lokal, seperti lahan yang bernilai strategis, yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional dan internasional. Tujuan utama dari kedaulatan ekonomi adalah memastikan bahwa sistem perekonomian tidak hanya terpusat pada pemerintah atau negara, tetapi juga membuka peluang bagi komunitas dan individu untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri.

Karawang, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, juga memiliki potensi sumber daya alam hayati, seperti perikanan di wilayah pesisir utara. Salah satu bentuk kebijakan lokal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan tambak ikan nila dan udang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kebijakan ini memanfaatkan tambak air payau seluas 18.000 hektare untuk budidaya ikan nila dan udang vaname guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan (Antara News). Selain itu, program inkubasi juga menjadi kebijakan penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Program ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi lokal. Salah satu contohnya adalah Desa Pisangsambo di Kecamatan Tirtajaya, di mana program inkubasi berhasil mengembangkan produk olahan rumput laut dengan desain menarik, sehingga meningkatkan nilai tambah produk lokal (Borneonews).

Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang melalui penerapan konsep kedaulatan ekonomi. Penulis berharap penelitian ini mampu menggali lebih dalam tentang penerapan konsep tersebut dan mengidentifikasi peluang yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola perekonomiannya secara mandiri serta menikmati hasilnya secara optimal. Penerapan konsep kedaulatan ekonomi, yang pertama kali dicetuskan oleh Soekarno melalui pidato Deklarasi Ekonomi Ambeg-Paramara Arta, diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan konsep ini, masyarakat lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang menikmati manfaat pembangunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi Karawang pada

modal asing dan sektor industri besar, sekaligus memperkuat kapasitas lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi sumber daya daerah.

Studi Literatur

Kajian literatur merupakan suatu proses penting dalam penelitian dengan melakukan, peninjauan dan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, teori, serta informasi yang relevan dengan topik tertentu. Tujuan utama kajian literatur adalah untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan terkait tema yang diteliti dan menemukan kesenjangan atau peluang penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ilmiah, kajian literatur membantu peneliti mengetahui kontribusi penelitian terdahulu, konsep-konsep kunci, serta metodologi yang sudah digunakan sebelumnya, sehingga penelitian baru bisa memberikan perspektif atau temuan yang lebih baru dan inovatif. Selain itu, kajian literatur berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memperkuat argumen penulis. Dengan mengaitkan penelitian saat ini dengan karya-karya ilmiah terdahulu, peneliti dapat memastikan bahwa penelitiannya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari diskusi ilmiah yang lebih luas. Melalui kajian literatur, penulis juga dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai teori atau temuan dan memastikan penelitian baru dapat memberikan kontribusi atau solusi terhadap permasalahan yang belum terjawab dalam studi-studi sebelumnya.

Kajian literatur yang pertama, pada tahun 2019 yang merupakan karya ilmiah Widhyartono, Arqom Kuswanjono, dan Misnal Munir, berjudul “Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila.” Penelitian ini menyoroti gagasan kedaulatan ekonomi yang dicetuskan oleh Sukarno serta penerapannya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahannya. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana konsep kedaulatan ekonomi tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari visi politik dan ideologi nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Konsep kedaulatan ekonomi dalam pemerintahan Sukarno memainkan peran penting untuk mewujudkan kemandirian nasional, terutama dalam menghadapi dominasi ekonomi asing. Sukarno berusaha menggeser arah ekonomi Indonesia agar lebih menekankan pada pemberdayaan sumber daya lokal, meminimalkan ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri. Melalui kebijakan nasionalisasi aset dan penguatan sektor ekonomi rakyat, konsep ini diimplementasikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri secara ekonomi dan politik.

Penelitian Widhyartono, Kuswanjono, dan Munir juga mengulas aspek hukum yang mendasari pelaksanaan kedaulatan ekonomi. Mereka menyoroti bahwa penerapan kedaulatan ekonomi tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber daya, tetapi juga memerlukan kerangka hukum yang mendukung keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, penelitian tersebut menggambarkan keterkaitan erat antara ekonomi dan hukum dalam konteks ekonomi Pancasila, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana konsep kedaulatan ekonomi dapat diterapkan di era modern. Selain sebagai strategi dalam melawan neo-kolonialisme, gagasan ini juga menawarkan pandangan tentang pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nasional.

Kajian literatur kedua berasal dari karya ilmiah Ramlan, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berjudul “Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional.” Jurnal ini menekankan pemahaman konsep kedaulatan ekonomi

menurut Soekarno serta bagaimana landasan hukum ekonomi berdaulat bertumpu pada pemulihan kendali ekonomi sepenuhnya kepada rakyat. Kehadiran investor asing, secara teoritis, dapat memberikan manfaat luas bagi negara, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan terhadap bahan baku lokal, serta menambah devisa melalui orientasi ekspor. Selain itu, penanaman modal asing juga diharapkan mendorong alih teknologi dan pengetahuan (transfer of know-how) bagi ekonomi domestik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penanaman modal harus selaras dengan penyelenggaraan ekonomi nasional untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas teknologi, dan mempromosikan ekonomi kerakyatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33, menekankan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip kemandirian dan kebersamaan, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menerima modal asing sebagai pelengkap. Selain itu, Pasal 33 juga menegaskan bahwa sektor-sektor strategis dan sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup rakyat harus dikuasai negara demi kemakmuran bersama. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila yang menolak prinsip-prinsip ekonomi liberal.

Berdasarkan kedua kajian literatur diatas, penulis mencoba menawarkan novelty (kebaruan) dengan fokus pada dinamika penerapan kedaulatan ekonomi dalam konteks kontemporer dan tantangan globalisasi. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada konsep dasar kedaulatan ekonomi Sukarno dan landasan hukumnya, penelitian ini berupaya mengisi celah dengan menganalisis relevansi dan adaptasi konsep tersebut di era modern. Hal ini mencakup bagaimana prinsip kedaulatan ekonomi dapat bertahan di tengah keterbukaan pasar dan dominasi modal asing, serta bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan potensi ekonomi lokal tanpa kehilangan daya saing internasional. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur dengan menyoroti aspek interaksi antara kedaulatan ekonomi dan strategi politik nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus menawarkan perspektif baru tentang cara menciptakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan kemandirian nasional.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena kedaulatan ekonomi melalui interpretasi data sekunder dari berbagai sumber. Penulis akan mengkaji literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita, dan melakukan wawancara untuk menganalisis konsep-konsep yang relevan serta implementasinya di era modern. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi celah atau tantangan dalam penerapan konsep kedaulatan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global dan pengaruh modal asing. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan memberikan pemahaman holistik terkait objek kajian (Creswell 2014).

Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan konsep “kedaulatan ekonomi” dalam konteks hubungan internasional sebagai kerangka konsep. Fokus penulis dalam penelitian untuk mengaitkan konsep kedaulatan ekonomi dengan isu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang. Kedaulatan ekonomi, yang sering dikenal sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan, merujuk pada upaya mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Konsep ini banyak dipopulerkan oleh Mohammad Hatta,

salah satu tokoh proklamator dan penggagas utama sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Hatta memandang bahwa sistem ekonomi liberal—yang menekankan persaingan bebas dan orientasi keuntungan—bukanlah model yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Hatta, sistem ekonomi tersebut cenderung tidak sejalan dengan karakter dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan bahwa ekonomi kerakyatan adalah bentuk perlawanan terhadap ekonomi liberal, sekaligus upaya untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih adil dan berkelanjutan (Moh. Musfiq Arifqi 2020).

Konsep ekonomi kerakyatan mendapatkan momentum lebih kuat setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, yang mengungkap kelemahan fundamental ekonomi berbasis liberalisasi dan globalisasi. Dalam konteks penelitian ini, penerapan ekonomi kerakyatan dikaitkan dengan strategi pengentasan kemiskinan di Karawang, di mana pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan sektor ekonomi rakyat dipandang sebagai kunci untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Kerangka ini juga akan melihat bagaimana keterkaitan antara pembangunan ekonomi lokal dan kedaulatan nasional dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan mengatasi ketergantungan pada modal asing.

Secara keseluruhan, kerangka konsep ini akan mengeksplorasi bagaimana kedaulatan ekonomi di tingkat lokal dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global. Selain itu, penelitian ini akan memetakan relevansi prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dengan isu-isu hubungan internasional kontemporer, seperti perdagangan global dan pengaruh investasi asing.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan UMKM dalam Menekan Ketimpangan

Kabupaten Karawang yang menjadi salah satu sentral perekonomian industri terbesar di Indonesia, dan sebagai daerah penghasil padi hingga keragaman hayati laut hingga sumber daya alam yang lainnya. Yang seharusnya menjadikan daerah Kabupaten Karawang menjadi pusat perekonomian terbesar dengan perekonomian yang merata keseluruh wilayah. Bagian ini akan memaparkan data dan analisis mengenai distribusi ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karawang sebagai bagian dari upaya memahami penerapan kedaulatan ekonomi di tingkat lokal. Data yang diolah mencakup nilai Gini Rasio, angka kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka, yang diambil dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan pemerintah daerah. Pembahasan ini juga berusaha menilai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan telah berperan dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal. Selain itu, perbandingan dengan data dari wilayah lain di Jawa Barat dan nasional akan memperlihatkan posisi Karawang dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan kedaulatan ekonomi dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mendorong kemandirian lokal.

Tabel 1.1 Gini Rasio Kabupaten/Kota Jawa barat

Wilayah Jawa Barat	Gini Rasio Kabupaten/Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	0.407	0.402	0.403	0.412	0.417
Bogor	0.416	0.404	0.381	0.396	0.4

Sukabumi	0.329	0.347	0.334	0.343	0.309
Cianjur	0.37	0.363	0.35	0.372	0.313
Bandung	0.418	0.355	0.414	0.386	0.37
Garut	0.371	0.352	0.352	0.322	0.302
Tasikmalaya	0.353	0.322	0.343	0.378	0.378
Ciamis	0.309	0.354	0.336	0.342	0.337
Kuningan	0.397	0.435	0.361	0.349	0.345
Cirebon	0.364	0.344	0.338	0.339	0.355
Majalengka	0.365	0.347	0.336	0.354	0.367
Sumedang	0.42	0.344	0.384	0.359	0.394
Indramayu	0.316	0.284	0.319	0.321	0.3
Subang	0.334	0.333	0.35	0.329	0.36
Purwakarta	0.397	0.399	0.414	0.388	0.367
Karawang	0.331	0.357	0.327	0.374	0.353
Bekasi	0.356	0.354	0.372	0.34	0.373
Bandung Barat	0.394	0.362	0.376	0.356	0.368
Pangandaran	0.303	0.31	0.335	0.32	0.294
Kota Bogor	0.389	0.386	0.412	0.441	0.43
Kota Sukabumi	0.41	0.419	0.397	0.436	0.482
Kota Bandung	0.423	0.442	0.402	0.427	0.459
Kota Cirebon	0.432	0.408	0.421	0.489	0.468
Kota Bekasi	0.336	0.352	0.352	0.401	0.441
Kota Depok	0.365	0.344	0.344	0.367	0.394
Kota Cimahi	0.364	0.437	0.38	0.415	0.408
Kota Tasikmalaya	0.39	0.36	0.366	0.414	0.405
Kota Banjar	0.322	0.302	0.312	0.341	0.362

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel data Gini Rasio diatas, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karawang menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, Gini Ratio Karawang tercatat sebesar 0,331, yang menandakan ketimpangan rendah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan hingga mencapai 0,357 pada 2019, diikuti penurunan ke 0,327 pada 2020. Meskipun demikian, ketimpangan kembali meningkat signifikan pada 2021 dengan nilai 0,374, dan sedikit membaik menjadi 0,353 di 2022.

Berdasarkan data Gini Ratio, ketimpangan pendapatan di Karawang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan dari 0,327 pada 2020 menjadi 0,374 pada 2021, sebelum sedikit menurun menjadi 0,353 pada 2022. Tren peningkatan ini, terutama pada 2021, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kesenjangan ekonomi masyarakat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, yang mencatat peningkatan Gini Ratio dari 0,407 pada 2018 menjadi 0,417 pada 2022, Karawang masih berada pada posisi yang lebih baik. Namun, peningkatan ketimpangan di Karawang tetap menjadi sinyal bahwa pemerataan pendapatan perlu diperkuat, terutama dengan memperhatikan sektor-sektor yang terdampak pandemi.

Berdasarkan data Gini Ratio, terdapat perbedaan dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Bekasi selama lima tahun terakhir. Karawang menunjukkan fluktuasi signifikan, dimulai dari 0,331 pada 2018 dan mencapai titik terendah di 0,327 pada 2020, sebelum meningkat tajam menjadi 0,374 pada 2021 dan sedikit turun ke 0,353 pada 2022. Sementara itu, Purwakarta mencatat tren penurunan ketimpangan dalam lima tahun terakhir, dari 0,397 pada 2018 menjadi 0,367 pada 2022, meskipun sempat mengalami peningkatan kecil pada 2020 dengan angka 0,414. Hal ini menunjukkan bahwa Purwakarta berhasil menjaga kestabilan dalam pemerataan pendapatan meski ada dampak pandemi. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi mengalami fluktuasi moderat namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Gini Ratio Bekasi naik dari 0,356 pada 2018 hingga 0,373 pada 2022, dengan penurunan sementara pada 2020 di angka 0,34. Kenaikan yang terjadi di tahun-tahun pascapandemi, seperti pada 2021 dan 2022, menunjukkan adanya tantangan dalam pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

Jika dibandingkan, Karawang dan Bekasi mengalami peningkatan ketimpangan yang cukup signifikan pada periode 2020–2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, Karawang mampu sedikit memperbaiki ketimpangannya pada 2022, sementara Bekasi justru mengalami peningkatan. Purwakarta, di sisi lain, menunjukkan performa lebih stabil dengan tren penurunan konsisten, menandakan adanya efektivitas dalam pengelolaan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Perbandingan ini mengindikasikan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan ketimpangan dengan cara dan hasil yang berbeda, sehingga intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dibutuhkan untuk memperkuat pemerataan pendapatan di masing-masing kabupaten.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Hadis Herdiana, menegaskan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 18% dari target awal. "Banyak sektor ekonomi masyarakat yang terdampak hingga tidak bisa menghasilkan PAD," jelasnya. Dari target sebesar Rp 930 miliar, PAD Karawang hanya tercapai Rp 762 miliar pada 2020. Salah satu sektor yang terdampak berat adalah pariwisata, yang sementara waktu terhenti selama pandemi. "Bagaimana mau kita kutip retribusi jika usaha mereka terhenti?" katanya.

Selain pariwisata, sektor perhotelan dan rumah makan juga mengalami penurunan tajam dalam tingkat okupansi, yang turut berpengaruh pada PAD. "Perhotelan memiliki kontribusi besar terhadap PAD kita, jadi ketika mereka terdampak, kita juga ikut terdampak," lanjutnya. Meskipun terjadi penurunan PAD, Hadis memastikan bahwa kegiatan pembangunan tetap berjalan meski ada beberapa kegiatan yang ditunda untuk fokus pada penanganan COVID-19. "Masih bisa berjalan kok pembangunan," tegasnya (Pemda Kab Karawang).

Korelasi antara peningkatan Gini Ratio dan penurunan PAD memperlihatkan bahwa masa transisi pasca pandemi tidak hanya berdampak pada penerimaan pemerintah, tetapi juga

memperburuk kesenjangan ekonomi masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi di sektor-sektor utama menunjukkan bahwa dampak pandemi lebih terasa pada kelompok masyarakat yang bergantung pada usaha lokal dan pariwisata, sehingga mengakibatkan ketimpangan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga tren penurunan ketimpangan di Karawang, seperti mendorong ekonomi kerakyatan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, agar pembangunan tetap berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi pascapandemi.

Oleh karena itu, penerapan konsep kedaulatan ekonomi atau ekonomi kerakyatan yang telah di gaungkan oleh Mohammad Hatta dan Soekarno. Harus segera diterapkan kembali oleh pemerintahan indonesia terlebih oleh pemerintah daerah karawang, untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di daerah lokal terlebih karawang. dalam penelitian ini penulis mencoba memetakan jumlah data koperasi UMKM yang ada di daerah karawang.

Tabel 1.2 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2021-2022

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit)	
	2021	2022
Bogor	45013	43138
Sukabumi	51796	51307
Cianjur	44089	36331
Bandung	40136	41220
Garut	62842	69365
Tasikmalaya	46132	77632
Ciamis	29628	30454
Kuningan	16180	11317
Cirebon	18053	21939
Majalengka	26634	33468
Sumedang	19160	24739
Indramayu	16481	18946
Subang	18014	16958
Purwakarta	14504	13486
Karawang	14239	15410
Bekasi	20610	19111
Bandung Barat	22366	20213
Pangandaran	12906	32043
Kota Bogor	5669	4620
Kota Sukabumi	5392	5787
Kota Bandung	22230	18174
Kota Cirebon	4767	4335

Kota Bekasi	10824	8971
Kota Depok	13916	11429
Kota Cimahi	6552	6087
Kota Tasikmalaya	30306	26706
Kota Banjar	3786	4609
Provinsi Jawa Barat	622225	667795

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan data tabel diatas, Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Jawa Barat pada tahun 2021 dan 2022, terlihat dinamika pertumbuhan dan penurunan jumlah unit UMK di berbagai kabupaten/kota. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah UMK dari 622.225 unit pada 2021 menjadi 667.795 unit pada 2022, yang menunjukkan adanya pemulihan dan perkembangan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

Beberapa wilayah menunjukkan pertumbuhan signifikan, seperti Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami peningkatan jumlah UMK dari 46.132 unit pada 2021 menjadi 77.632 unit pada 2022. Kabupaten Garut juga mencatat pertumbuhan positif, dengan jumlah UMK naik dari 62.842 unit menjadi 69.365 unit pada periode yang sama. Peningkatan mencolok juga terlihat di Kabupaten Pangandaran, dari hanya 12.906 unit pada 2021 melonjak tajam menjadi 32.043 unit pada 2022, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat di daerah tersebut.

Namun, beberapa wilayah mengalami penurunan jumlah UMK. Contohnya, Kabupaten Cianjur mengalami penurunan cukup drastis, dari 44.089 unit pada 2021 menjadi 36.331 unit pada 2022. Penurunan juga terjadi di Kota Bogor, dari 5.669 unit menjadi 4.620 unit, serta Kota Bandung, yang turun dari 22.230 unit menjadi 18.174 unit. Kabupaten Karawang sendiri menunjukkan tren peningkatan, dari 14.239 unit pada 2021 menjadi 15.410 unit pada 2022, meskipun peningkatannya tidak sebesar beberapa daerah lain.

Secara umum, wilayah-wilayah dengan peningkatan tajam dalam jumlah UMK seperti Tasikmalaya, Garut, dan Pangandaran mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pemulihan pascapandemi. Di sisi lain, penurunan jumlah UMK di beberapa daerah,

seperti Cianjur dan Kota Bandung, menunjukkan adanya tantangan yang masih dihadapi, baik dari segi ekonomi maupun pengembangan usaha. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor UMK di daerah yang masih tertinggal agar pemerataan ekonomi dapat tercapai secara optimal di seluruh wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan data diatas terkait persebaran UMK di daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Karawang, pasalnya jika dilihat dari data UMK, Kabupaten Karawang mempunyai jumlah persebaran UMK yang lebih rendah dibanding dari Kabupaten Bekasi, yang mampu berdiri dan men-stabilkan persebaran UMK nya.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor usaha, baik berskala besar maupun kecil, di Kabupaten Karawang. Tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan omset, tetapi perusahaan-perusahaan besar di kawasan industri juga menghadapi kerugian serius. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan mereka. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Karawang, Fadludin Damanhuri, mengungkapkan bahwa sebanyak 14

perusahaan di Karawang terdampak pandemi dan mengalami kesulitan operasional. "14 perusahaan di Karawang saat ini kondisinya memprihatinkan," kata Fadludin pada Selasa (5/5/2020) dilansir dari (suara karya co.id).

Selain PHK, beberapa perusahaan juga memilih untuk meliburkan atau merumahkan karyawan guna mengurangi beban operasional. Meskipun demikian, jumlah pasti karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan masih dalam proses pendataan. Terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan di Karawang pada 6 Mei 2020, Fadludin mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut belum menerima penjelasan teknis dari pemerintah daerah. "Perusahaan sebelumnya memang ada pertemuan dengan jajaran Pemkab Karawang, membahas tentang persiapan PSBB, tapi tidak dibahas secara rinci mengenai teknis perusahaan," jelasnya (suara karya co.id).

Kondisi ini mencerminkan tantangan besar bagi dunia usaha di Karawang, di mana pandemi tidak hanya menurunkan produktivitas dan omset, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja. Penurunan aktivitas industri secara langsung turut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang, karena banyak sektor yang menyumbang PAD, seperti industri dan perhotelan, mengalami penurunan tajam selama pandemi.

Kabupaten/Kota	Produksi Udang (Ton)	Nilai Produksi Udang (Ribu Rp)	Produksi Ikan (Ton)	Nilai Produksi Ikan (Ribu Rp)	Produksi Lainnya (Ton)	Nilai Produksi Lainnya (Ribu Rp)	Total Produksi (Ton)	Total Nilai Produksi (Ribu Rp)
Bogor	4	99225	99	3745660	0	0	103	3844885
Sukabumi	14	709200	220	5696514	0	0	234	6405714
Cianjur	16	478538	439	6797237	0	0	455	7275775
Bandung	4	23870	253	4706847	0	0	257	4730717
Garut	0	0	268	7693090	0	0	268	7693090
Tasikmalaya	0	0	257	5958075	0	0	257	5958075
Ciamis	2	18468	297	5528065	1	69000	300	5615533
Kuningan	10	382080	358	9043084	0	0	368	9425164
Cirebon	0	0	7	207360	0	0	7	207360
Majalengka	0	0	751	20352835	0	0	751	20352835
Sumedang	2	71066	1407	27103649	0	0	1409	27174715
Indramayu	2324	51796684	7200	140521806	0	0	9524	192318490
Subang	0	0	31	591484	0	0	31	591484
Purwakarta	5	25135	1478	19352516	2	143000	1485	19520651
Karawang	0	0	68	1073734	0	0	68	1073734
Bekasi	0	0	55	1375525	0	0	55	1375525
Bandung Barat	0	0	196	3321361	0	0	196	3321361
Pangandaran	5	494000	7	159855	0	0	12	653855
Kota Bogor	0	0	2	34315	0	0	2	34315
Kota Sukabumi	0	0	2	67358	0	0	2	67358
Kota Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Bekasi	0	0	69	2138914	0	0	69	2138914
Kota Depok	0	0	85	2020923	0	0	85	2020923
Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota Tasikmalaya	8	210925	93	1705774	0	0	101	1916699
Kota Banjar	0	4850	16	339765	0	0	16	344615
Jawa Barat	2394	54314041	13658	269535746	3	212000	16055	324061787

Gambar 1.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Jawa Barat, 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan, masa transisi pasca-COVID-19 telah mendorong berbagai daerah di Jawa Barat untuk berupaya secara mandiri meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi daerahnya, termasuk pada sektor perikanan yang memiliki peran strategis. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis berhasil mengoptimalkan potensi sektor perikananannya melalui konsep kedaulatan ekonomi, seperti yang tercermin dari penerapan Smart Fisheries Village (SFV) di Kampung Nila, Kawali. Strategi ini terbukti meningkatkan produktivitas perikanan secara signifikan, dengan total produksi ikan mencapai 297 ton dan nilai produksi sebesar 5.615.533 ribu rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Karawang, meskipun memiliki potensi geografis yang lebih besar, belum mampu memanfaatkan sektor perikananannya secara optimal, dengan produksi ikan hanya mencapai 68 ton dan nilai produksi sebesar 1.073.734 ribu rupiah.

Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penerapan konsep pengelolaan perikanan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi seperti yang dilakukan di Ciamis. Dengan memanfaatkan potensi geografis serta dukungan teknologi, kolaborasi yang tepat dengan para stakeholder dan manajemen yang tepat, Karawang dapat menjadikan sektor perikanan sebagai pilar kedaulatan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, implementasi strategi inovatif yang berfokus pada keberlanjutan dan kemandirian ekonomi harus menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan di Karawang dan daerah lainnya.

Untuk merealisasikan sektor perikanan yang sesuai dengan mekanisme dan konsep kedaulatan ekonomi di Kabupaten Karawang, diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis keberlanjutan. Berdasarkan wawancara dengan Lim Gala Permana, Ketua GAPOKAN SFV Kampung Nila Kawali, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi daerah melalui inovasi yang mencakup pengelolaan dari hulu ke hilir. Hal ini terbukti efektif di Kampung Nila, di mana produksi ikan nila dilakukan secara terkendali dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Selain itu, kemitraan dengan warga sekitar turut memastikan kestabilan produksi, sementara penciptaan pasar mandiri memberikan kepastian penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga jual.

Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan permodalan. Untuk mengatasinya, SDM di Kampung Nila melakukan studi banding ke daerah-daerah yang dianggap sukses dalam budidaya perikanan guna mengadopsi praktik terbaik. Selain itu, potensi pasar yang besar menjadi pendorong utama pengembangan Kampung Nila, mengingat sekitar 70% kebutuhan ikan nila di Kabupaten Ciamis sebelumnya disuplai dari Cirata, Bandung. Dampaknya, selain menciptakan kemandirian sektor perikanan, keberhasilan Kampung Nila juga berkontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja dan munculnya usaha-usaha baru di bidang kuliner, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman ini, Kabupaten Karawang dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memanfaatkan potensi geografisnya yang lebih besar. Implementasi strategi berbasis kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan seperti di SFV Kampung Nila dapat menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan sektor perikanan Karawang. (Dilansir dari wawancara via WhatsApp oleh penulis dengan Lim Gala Permana, Ketua GAPOKAN SFV Kampung Nila Kawali).

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,45	72,05	(+)0,84 poin
2.	Angka Kemiskinan	7,72 %	7,42	(-)3,89 %
3.	Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	3,75 %	3,52%	(-)6,13 %
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,02 %	4.99%	(+)1,36 %

5.	Persentase Kenaikan PDRB Per Kapita	29.577.031,30	31.855.511,12	(+)7,63
6.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,337	0,341	(+) 1,19 poin

Gambar 1.3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan data tabel, tingkat capaian kinerja tahun 2023 di Kabupaten Ciamis menunjukkan peningkatan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 0,84%, angka kemiskinan menurun sebesar 3,89%, laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,36%, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik sebesar 7,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis, khususnya Kampung Nila melalui penerapan konsep **Smart Fisheries Village (SFV)**, mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah dengan mengadopsi prinsip kedaulatan ekonomi.

Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Giyatno, penerapan SFV di Kampung Nila telah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola budi daya ikan nila, sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan. "Tentunya pendapatan sangat meningkat 300-400 persen. Yang tadinya ikan nila dalam satu kolam hanya menghasilkan 100 kilogram, dengan konsep **Sibudi Dikuncir** (Sistem Budi Daya Ikan Nila dengan Sentuhan Teknologi Kincir), hasilnya meningkat 300-400 persen. Hal ini memberikan keuntungan dan pendapatan yang sangat luar biasa," ujar Giyatno di Kampung Nila, Desa Kawali, Ciamis, Rabu (dikutip dari Antara).

Melalui berbagai penyuluhan dan pembinaan, masyarakat Kampung Nila tidak hanya terfokus pada panen ikan, tetapi juga mengolah hasil budi daya menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti kerupuk, camilan ringan, kue bolu, es jelly, seblak, hingga es krim. Hal ini turut berdampak pada bertambahnya lapangan kerja di sektor perikanan dan bidang usaha lainnya. Selain itu, menurut Lim Gala Permana, Ketua GAPOKAN Kampung Nila Kawali, keberhasilan Kampung Nila juga menarik banyak pengunjung, sehingga memunculkan usaha-usaha baru di bidang kuliner dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Dengan adanya Kampung Nila, selain kemandirian di sektor perikanan, dampaknya juga terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," ujar Lim Gala dalam wawancara via WhatsApp oleh penulis.

Untuk memperkuat sektor perikanan di Karawang, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pengembangan Pusat Budidaya Perikanan di Pesisir Utara Karawang: Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan kampung perikanan dengan konsep berkelanjutan seperti SFV.
2. Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat: Program pelatihan dan pendampingan teknis bagi nelayan dan pembudidaya sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil perikanan.
3. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Pemerintah: Karawang harus mendorong kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta lembaga swasta untuk memastikan akses terhadap pasar domestik dan internasional.

4. Pemberian Insentif dan Fasilitas Permodalan: Pemerintah daerah perlu menyediakan insentif fiskal dan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil di sektor perikanan guna mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan menerapkan kebijakan ini, sektor perikanan di Karawang dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal yang signifikan, sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir.

4. Kesimpulan

Penerapan konsep kedaulatan ekonomi di Kabupaten Karawang merupakan strategi potensial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada. Meskipun pertumbuhan ekonomi Karawang pesat sebagai pusat industri, pemerataan hasil ekonomi belum optimal. Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) masih memerlukan dukungan kebijakan pemerintah agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap ekonomi lokal. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar dengan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 18%, sekaligus memperburuk ketimpangan pendapatan. Data Gini Ratio menunjukkan fluktuasi ketimpangan, dengan kenaikan signifikan pada 2021. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada industri besar. Pengalaman Kampung Nila di Ciamis dapat menjadi contoh inspiratif bagi Karawang dalam mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan dan berorientasi ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan kebijakan, pelatihan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Karawang dapat memperkuat ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Keterbatasan dalam penulisan ini meliputi beberapa aspek, yaitu keterbatasan waktu dan tempat dalam mengumpulkan data secara langsung. Penulis tidak dapat melakukan observasi lapangan secara mendalam akibat keterbatasan akses dan jarak ke lokasi penelitian, sehingga beberapa informasi hanya diperoleh melalui wawancara daring dan sumber sekunder. Selain itu, keterbatasan literatur yang relevan dan terkini mengenai penerapan konsep Smart Fisheries Village (SFV) di konteks lokal juga menjadi tantangan dalam memperluas kajian. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di masa mendatang, penulis merekomendasikan pengalokasian waktu yang lebih panjang untuk pengumpulan data primer, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas setempat untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam.

Daftar Pustaka

- ANTARA NEWS. (2024). *Ratusan Pelaku UMKM Di Karawang Siap Naik Kelas*. Diambil kembali dari <https://jabar.antaranews.com/berita/517674/ratusan-pelaku-umkm-di-karawang-bersiap-naik-kelas>
- Arifqi, M. M. (2020). KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (TELA'AH PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- BPS PROVINSI JAWA BARAT. (2024). *Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2021-2022*. Diambil kembali dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUyIzI=/banyaknya--usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>

- BPS PROVINSI JAWA BARAT. (2024). *Gini Rasio Tahun Kab/Kota 2018-2022*. Diambil kembali dari <https://karawangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg4IzE=/gini-rasio-tahun-kab-kota-2018-2022.html>
- BPS PROVINSI JAWABARAT. (2024). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Karawang Maret 2024*. Diambil kembali dari <https://karawangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/322/profil-kemiskinan-di-kabupaten-karawang-maret-2024.html>
- Muallimah, S. (t.thn.). KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH.
- Ramlan. (2022). POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*.
- RMOL BISNIS. (2024). *Kampung Nila Kawali Raup Cuan Miliaran Rupiah Tiap Tahun*. Diambil kembali dari <https://rmol.id/bisnis/read/2024/10/16/641034/kampung-nila-kawali-raup-cuan-miliaran-rupiah-tiap-tahun>
- Suarakarya.co.id. (2020). *14 Industri di Karawang Setop Operasi dan PHK Ribuan Karyawan*. Diambil kembali dari <https://suarakarya.co.id/14-industri-di-karawang-setop-operasi-dan-phk-ribuan-karyawan/21534/ekonomi-dan-bisnis/>

Meninjau Kembali Interlinkages Pendidikan dan Kemiskinan dalam Pencapaian SDGs Di Kabupaten Karawang

Revisiting The Relationship Between Education And Poverty In Achieving SDGs In Karawang Regency

¹Etisumiyati

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.76, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat
e-mail: 1etisumiyati46@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4) dan Penghapusan Kemiskinan (Tujuan 1) menjadi dua tujuan yang saling terkait. Untuk menghentikan siklus kemiskinan dan memungkinkan mobilitas sosial ke atas, peningkatan akses ke pendidikan berkualitas tinggi sangat penting. Jika dikaitkan dengan keadaan di Kabupaten Karawang, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem berlatar belakang pendidikan rendah. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur mengenai Analisis Interlinkages untuk menganalisis hubungan antar indikator di Tujuan 1 dan Tujuan 4 SDGs didasarkan pada *SDGs Interlinkages Analysis & Visualisation Tool* yang dikembangkan Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Hasil studi literatur menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan erat antar indikator yaitu peningkatan sarana prasarana pendidikan dan perluasan beasiswa untuk negara berkembang berhubungan kuat dengan indikator pengurangan separuh kemiskinan nasional dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Indikator pendidikan gratis di tingkat dasar dan tingkat pertama didukung oleh adanya pembentukan framework kebijakan penanggulangan kemiskinan namun mempunyai hubungan negatif dengan indikator perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Indikator menghilangkan kesenjangan gender di semua tingkat pendidikan mempunyai hubungan searah dengan indikator penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mempunyai hubungan dua arah dengan indikator pengurangan separuh kemiskinan nasional. Analisis interlinkages ini tentunya dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Kata kunci: SDGs, Interlinkages, Pendidikan, Kemiskinan

ABSTRACT

In the Sustainable Development Goals (SDGs), Quality Education (Goal 4) and Poverty Eradication (Goal 1) are two interrelated goals. To stop the cycle of poverty and enable upward social mobility,

increasing access to high-quality education is essential. When associated with the situation in Karawang Regency, based on data from the Targeting Data for the Acceleration of Extreme Poverty Elimination (P3KE), heads of families who are categorised as extremely poor have low educational backgrounds. This paper uses a literature study method on interlinkages Analysis to analyse the relationship between indicators in Goal 1 and Goal 4 of the SDGs based on the SDGs Interlinkages Analysis & Visualization Tool developed by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES). The results of the literature study show that there is a close relationship between indicators, namely improving educational infrastructure and expanding scholarships for developing countries, which are strongly related to the indicators of halving national poverty and eliminating extreme poverty. The indicator of free education at the elementary and junior high levels is supported by the establishment of a poverty alleviation policy framework but has a negative relationship with the indicator of social protection for the poor. The indicator of eliminating gender gaps at all levels of education has a unidirectional relationship with the indicator of eliminating extreme poverty, and has a two-way relationship with the indicator of halving national poverty. This interlinkage analysis can certainly be a reference in formulating poverty alleviation policies through improving the quality of education.

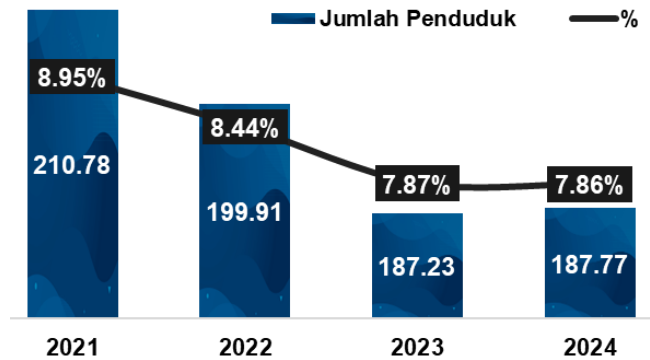
Keywords: *SDGs, Interlinkages, Poverty, Education.*

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, dan salah satu fokus utamanya adalah pendidikan. Tujuan 4, "Pendidikan Berkualitas", secara khusus bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. SDGs juga menekankan kemiskinan melalui Tujuan 1, "Tanpa Kemiskinan". Anak-anak dari keluarga miskin sering menghadapi masalah seperti sumber daya keuangan yang tidak mencukupi, infrastruktur yang tidak memadai, dan hambatan lain yang menghambat akses mereka ke pendidikan berkualitas. Untuk menghentikan siklus kemiskinan dan memungkinkan mobilitas sosial ke atas, peningkatan akses ke pendidikan berkualitas tinggi sangat penting.

Tujuan 4 dalam SDGs berfokus pada penjaminan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas sepanjang hidup mereka. Hal ini penting untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas tinggi akan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja, lebih banyak pendapatan, dan lebih banyak kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan individu. Kedua tujuan ini saling terkait, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk memerangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai SDGs, menangani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin sangat penting karena dapat memutus siklus kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas harus digabungkan dengan upaya untuk memberantas kemiskinan.

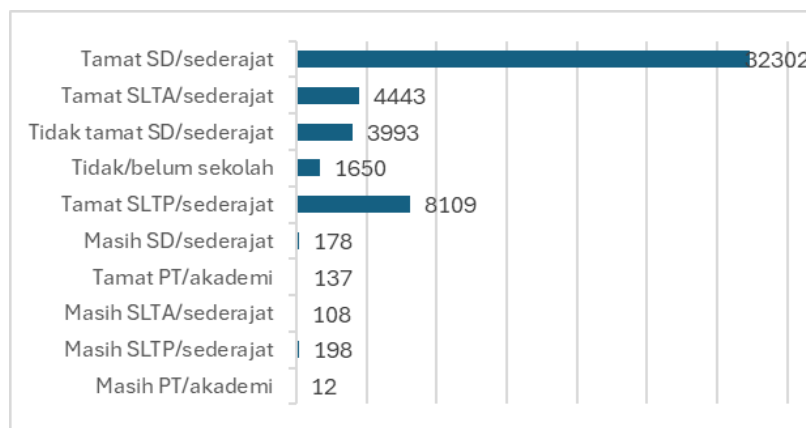
Kabupaten Karawang dalam hal ini, angka kemiskinannya masih di angka 7.86% pada tahun 2024. Angka ini menurun tipis dari tahun 2023 yang berada di angka 7.87%. Namun, secara jumlah, penduduk miskin di Kabupaten Karawang meningkat 540 orang. Ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penanggulangan kemiskinan.



Gambar 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Karawang 2021-2024

Sumber : BPS, 2024

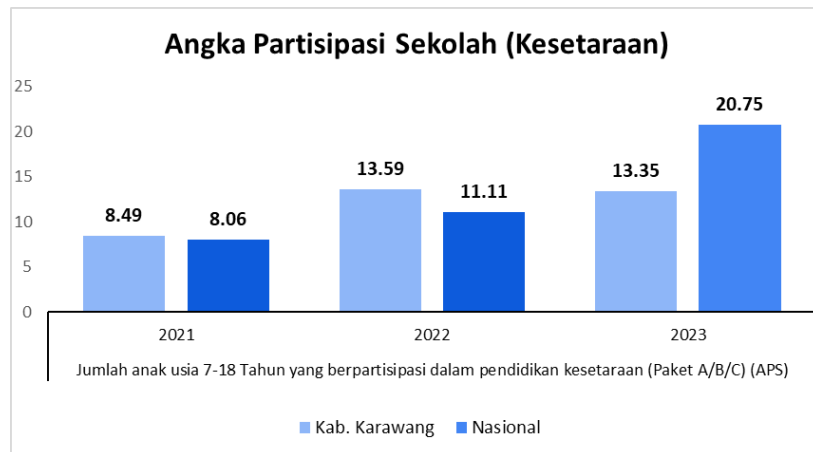
Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan bahwa Kepala Keluarga di Desil 1 mayoritas pendidikannya hanya sampai Tamat SD yaitu sebanyak 32.302 Kepala Keluarga. Kemudian sebanyak 8.109 hanya sampai Tamat SMP dan sebanyak 3.993 Kepala Keluarga tercatat Tidak Tamat SD. Ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga miskin mempunyai *background* pendidikan yang kurang.



Gambar 2. Pendidikan Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Karawang

Sumber : Data P3KE 2024, diolah

Selain itu, berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah jenjang Kesetaraan/Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) masih sangat rendah bahkan dibawah rata-rata nasional.



Gambar 3. Angka Partisipasi Sekolah jenjang Kesetaraan Kabupaten Karawang

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Karawang, 2024

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian yang tinggi terhadap rendahnya APS kesetaraan serta tingginya rasio kepala keluarga miskin yang berpendidikan rendah di Kabupaten Karawang.

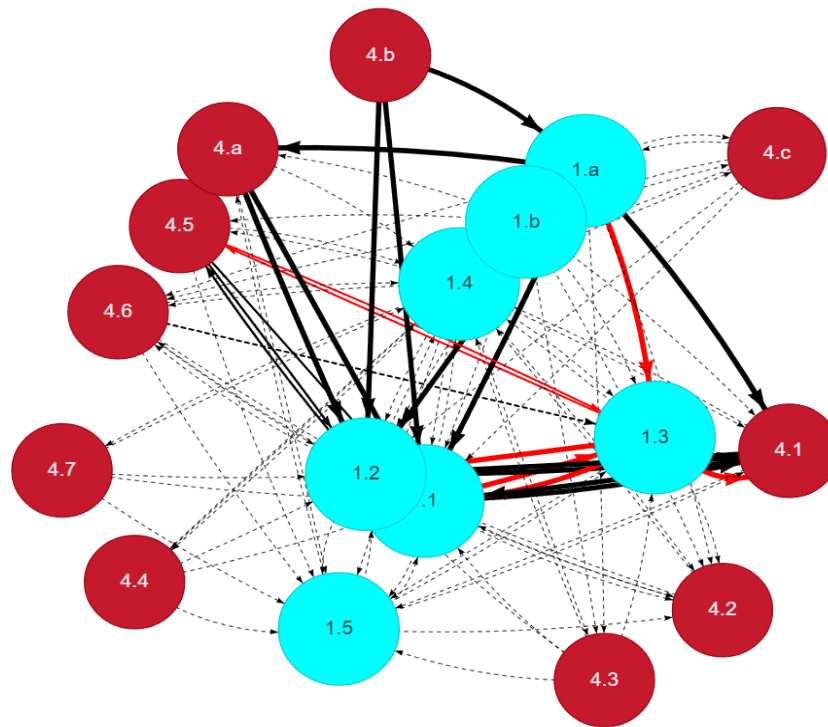
2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur mengenai Analisis Interlinkages untuk menganalisis hubungan antar indikator di Tujuan 1 dan Tujuan 4 SDGs didasarkan pada *SDGs Interlinkages Analysis & Visualisation Tool* yang dikembangkan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) pada tahun 2017 dan diperbarui pada tahun 2019 (V3.0), bertujuan untuk menyediakan alat praktis guna mendukung pembuatan kebijakan terpadu melalui perspektif interlinkage. Alat ini dibangun berdasarkan metodologi yang didasarkan pada empat komponen untuk mengidentifikasi, mengukur, memvisualisasikan, dan menganalisis interlinkage antara target SDG. *Tools* ini mendukung pembuatan kebijakan praktis untuk memastikan tercapainya satu tujuan atau target tanpa membahayakan pencapaian tujuan atau target lainnya melalui perencanaan dan pengaturan kelembagaan yang efektif. Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, akan dirumuskan keterkaitan antara pendidikan dan kemiskinan di Kabupaten Karawang melalui pendekatan analisis interlinkages.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 5 menunjukkan analisis interlinkages antara SDGs Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 4 (Pendidikan yang berkualitas) berdasarkan analisis *Institute for Global Environmental Strategies* (IGES). IGES melakukan pengembangan kebijakan inovatif dan penelitian strategis berkaitan dengan lingkungan yang menerjemahkan hasil penelitian menjadi keputusan politik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik di kawasan Asia-Pasifik maupun global melalui *SDGs Interlinkages Analysis and Visualisation Tool* yang dikembangkan.



Gambar 5. SDGs Interlinkages Analysis

Sumber : Peneliti, 2024

Analisis ini menunjukkan keterkaitan antar indikator dalam SDGs di Tujuan 1 dan Tujuan 4. Setiap simpul mewakili Target SDGs sedangkan target yang dipilih ditampilkan dalam warna biru.

- Setiap garis dengan panah yang menghubungkan dua simpul mewakili hubungan terarah/kausal antara dua Target, misalnya dari Target 1.1 ke Target 1.2.
- Ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan linier antara pasangan target.
- Garis hitam menunjukkan hubungan positif, dan garis merah menunjukkan hubungan negatif. Garis putus-putus menunjukkan bahwa data tingkat indikator tidak tersedia untuk target.

Dari Gambar 5 diatas menunjukkan, bahwa terdapat hubungan searah yang kuat antara indikator 4b (perluasan beasiswa untuk negara berkembang) dengan indikator 1.a (pembentukan framework kebijakan penanggulangan kemiskinan), indikator 1.1 (penghapusan kemiskinan ekstrim), indikator 1.2 (pengurangan separuh kemiskinan nasional). Indikator 4a (peningkatan sarana prasarana Pendidikan) berhubungan kuat dengan indikator 1.2 (pengurangan separuh kemiskinan nasional), indikator 1.1 (penghapusan kemiskinan ekstrim), serta ada hubungan sebaliknya yaitu antara indikator 1.a (pembentukan framework kebijakan penanggulangan kemiskinan) terhadap Indikator 4a (peningkatan sarana prasarana Pendidikan).

Indikator 4.1 (Pendidikan gratis di Tingkat dasar dan Tingkat pertama) didukung oleh adanya indikator 1.a (pembentukan framework kebijakan penanggulangan kemiskinan), hubungan dua arah dengan indicator 1.1 (penghapusan kemiskinan ekstrim) dan indikator 1.2 (pengurangan separuh kemiskinan nasional). Indikator 4.1 mempunyai hubungan negatif dengan indikator 1.3 (perlindungan sosial untuk Masyarakat miskin). Indikator 4.5 (menghilangkan kesenjangan gender di semua tingkat Pendidikan) mempunyai hubungan searah dengan indikator 1.1 (penghapusan

kemiskinan ekstrim), dan mempunyai hubungan dua arah dengan indikator 1.2 (pengurangan separuh kemiskinan nasional).

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, terdapat keterkaitan erat antar indikator SDGs di Tujuan 4 dan Tujuan 1 yaitu peningkatan sarana prasarana pendidikan dan perluasan beasiswa untuk negara berkembang berhubungan kuat dengan indikator pengurangan separuh kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Indikator pendidikan gratis di tingkat dasar dan tingkat pertama didukung oleh adanya pembentukan framework kebijakan penanggulangan kemiskinan namun mempunyai hubungan negatif dengan indikator perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Indikator menghilangkan kesenjangan gender di semua tingkat pendidikan mempunyai hubungan searah dengan indikator penghapusan kemiskinan ekstrim, dan mempunyai hubungan dua arah dengan indikator pengurangan separuh kemiskinan nasional.

Analisis interlinkages ini tentunya dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Indikator-indikator SDGs di Tujuan 1 dan 4 dapat menjadi indikator kinerja fokus untuk pengentasan kemiskinan yang terkait dengan pendidikan. Untuk mencapai hasil yang optimal dari masalah yang saling terkait ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Solusi kreatif dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung.

Daftar Pustaka

- Abera, Halefom Gezaei. 2022. The Role of Education in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs): A Global Evidence Based Research Article. <https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I1Y2023-09>
- Global Citizen. 7 February 2020. Understanding How Poverty is the Main Barrier to Education. Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <https://www.globalcitizen.org/en/content/poverty-education-satistics-facts/>
- Global Action Plan. 11 Januari 2017. The Sustainable Development Goals. (n.d.). Diakses pada 10 Oktober 2024 dari <http://www.globalactionplan.ie/schools-education/global-sustainable-development-goals>
- Resolusi PBB nomor 70/1. 2015. Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"
- SDGs Interlinkages. SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V4.0). Diakses pada 17 Oktober 2024 dari <https://sdginterlinkages.iges.jp/project.html>

